

**PEMAHAMAN MAHASISWA ILMU POLITIK ATAS PARTAI  
LOKAL DI ACEH**  
(Studi Kasus pada Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**IRNA SRI WAHYUNI**  
**Nim. 200801019**



**PRODI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU PEMERINTAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Irna Sri Wahyuni  
Nim : 200801019  
Jurusan : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu

Pemerintahan Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak Menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggung jawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Irna Sri Wahyuni

NIM. 20080101

**PEMAHAMAN MAHASISWA ILMU POLITIK ATAS PARTAI  
LOKAL DI ACEH  
(Studi Kasus Pada Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu  
Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

**Irna Sri Wahyuni**  
**NIM: 200801019**

Mahasiswa Program Studi Ilmu  
Politik Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Pemerintahan

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh :

**Pembimbing**



**Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.**

NIP. 198103162011011003

**PEMAHAMAN MAHASISWA ILMU POLITIK ATAS PARTAI  
LOKAL DI ACEH**  
(Studi Kasus pada Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

**SKRIPSI**

**Irna Sri Wahyuni**

**Nim: 200801019**

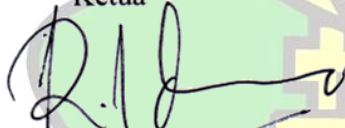
**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik  
Pada hari/Tanggal: Senin, 02 Desember 2024**

**30 Jumadil Awal 1446 H**

**Banda Aceh**

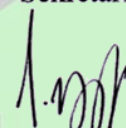
**Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:**

**Ketua**



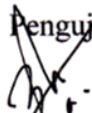
**Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D  
NIP. 1981031620011011003**

**Sekretaris**



**Lidya, S.IP.  
NIP. -**

**Penguji I**



**Aklima S. Fil.L., M.A.  
NIP. 198810062019032009**

**Penguji II**



**Arif Akbar, M.A.  
NIP. 199110242022031001**

Mengetahui,  
Dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Muji Mulia, M.Ag.  
NIP. 197403271999031005**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan ucapan terima kasih dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*Pemahaman Mahasiswa Ilmu Politik atas Partai Lokal di Aceh (Studi Kasus pada Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh).*”

Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana. Penulis sering kali mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi ini, namun atas dukungan, dorongan, nasehat, dan saran dari semua pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Pemahaman Mahasiswa Ilmu Politik atas Partai lokal di Aceh (Studi kasus pada prodi ilmu politik Uin Ar-Raniry Banda aceh)*”. Maka dalam hal ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Cinta pertamaku Ayahanda Banta Ali. Seorang yang darahnya mengalir dalam tubuh saya yang telah dengan sabar dan bangga membesarkan putri bungsunya serta telah melangitkan doa-doa segala yang saya sahakan dan saya perjuangkan semata untuk cinta pertama saya. Tidak henti saya bersyukur dan berterimakasih karnanya saya selalu bangkit dan tidak mengenal lelah. Terimakasih sudah merawat dan membesarkan dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk hidup saya berkerja keras untuk keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan berada di posisi saat ini.



2. Pintu surgaku,Ibunda Cut Meureudom Ratna. Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau atas segala doa,motivasi dan juga semangat yang telah diberikan kepada penulis.Terimakasih atas nasehat yang telah diberikan walaupun kadang pikiran kita tidak sejalan,terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati untuk menghadapi penulis yang keras kepala,Ibu menjadi pengingat dan penguat paling hebat,terimakasih sudah menjadi rumah untuk tempat pulang,saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk Ibu dan Ayah tercinta.
3. Saudara kandungku,kakakku Nyak Dewi berserta Suaminya dan Abangku Irwandi berserta Istrinya.Terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil,terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Kepana keponakan tercinta Ziandra Arzhanka Rafasya,Terimakasih atas kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
5. Dr.Muji Mulia,M.Ag. selaku Dekan,Wakil Dekan dan jajarannya fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Reza Indria,S.H.I.,M.A.,Ph.D. Selaku Pembimbing penulis,yang telah membimbing,mengarahkan,dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Penasehatan Akademik Dr. Ade Irma,B.H.Sc.,M.A dan seluruh Bapak Ibu dosen FISIP yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmunya kepada

8. Penulis selama ini serta seluruh staff fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. *Spesial to* Ghevira Erza Aneyra, saudari tak sedarah. Teman yang selalu ada baik dalam keadaan suka maupun duka. Teman yang tahu segala proses yang penulis jalani selama kuliah. Teman yang apa adanya dalam bersikap dan bertindak. Terimakasih telah ikhlas dalam berteman, semoga Allah senantiasa menjaga pesahabatan ini. setelah ini dimanapun nantinya engkau berproses, semoga selalu dikelilingi orang-orang baik yang selalu mendukungmu.
10. Untuk diri saya Irna Sri Wahyuni, Terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Dengan doa, usaha dan dukungan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. penulis merasa tidak mampu membalas semua bantuan yang telah diberikan oleh keluarga, bapak/ibu, dan teman-teman. semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. penulis menyadari masih ada kekurangan dalam tulisan ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk meningkatkan

kualitas penulisan ini.Semoga tulisan ini dapat menjadi amalan yang bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 16-Agustus- 2024

Irna Sri Wahyuni  
NIM. 20080101





## ABSTRAK

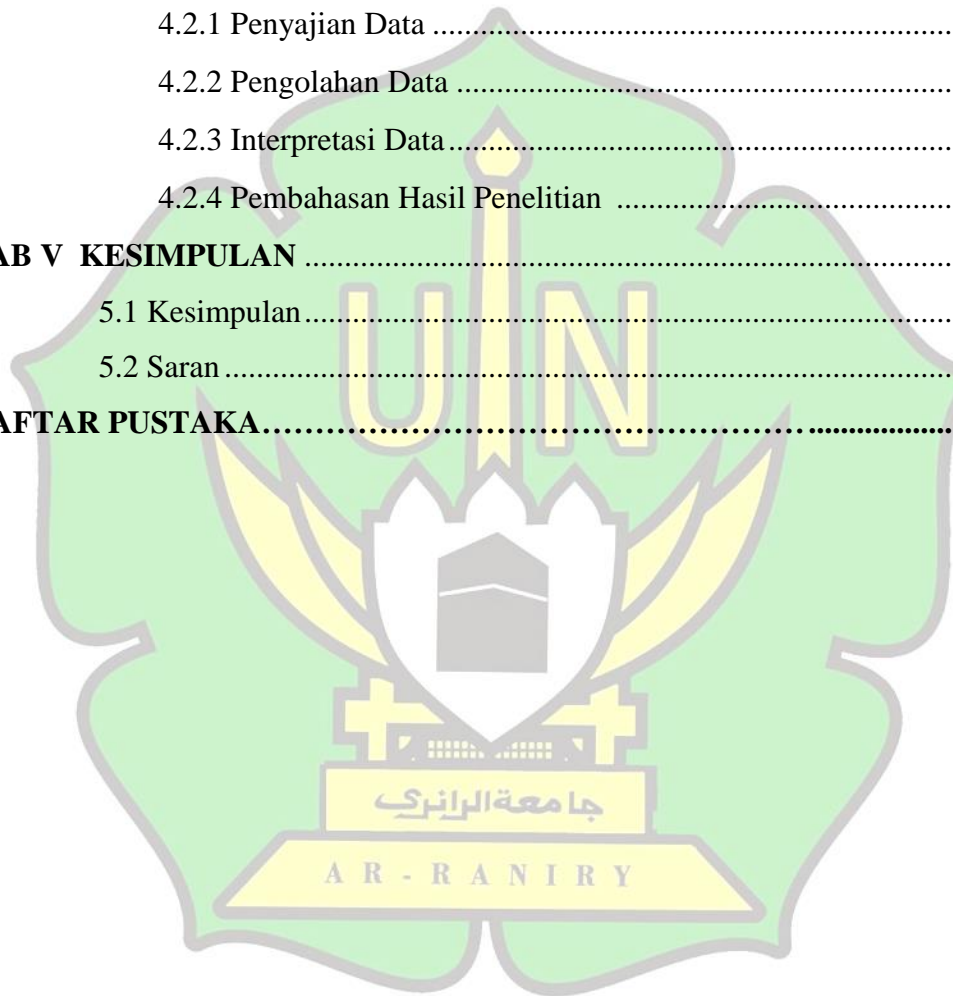
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar-Ranirry tentang perkembangan partai lokal di Aceh. Metode penelitian kualitatif digunakan yang melibatkan analisis komunikasi verbal atau tertulis serta Tindakan partisipasi penelitian. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari sejumlah wawancara tatap muka dengan responden yang dikumpulkan secara akurat. Tiga metode digunakan untuk memperoleh data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian lapangan yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif merupakan strategi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Mahasiswa di masyarakat khususnya yang belajar ilmu politik di UIN Ar-Ranirry Banda Aceh juga turut berbicara dan memahami dinamika politik di Aceh yang sedang berlangsung pada tahun 2024 ini. Berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa kurangnya pemahaman mahasiswa ilmu politik mengenai partai politik lokal di Aceh. Bahkan ada sebagian asumsi dari mahasiswa yang menganggap politik itu tidak baik dan tidak penting bagi kehidupan mereka begitu pula dengan partai lokal, oleh karena itu beberapa mahasiswa tersebut tidak mau berpartisipasi secara penuh dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa Ilmu Politik tentang partai lokal di Aceh sudah sangat signifikan dan sudah tidak asing lagi bagi mereka.

***Kata Kunci: Mahasiswa Ilmu Politik, Partai Lokal Aceh***

## DAFTAR ISI

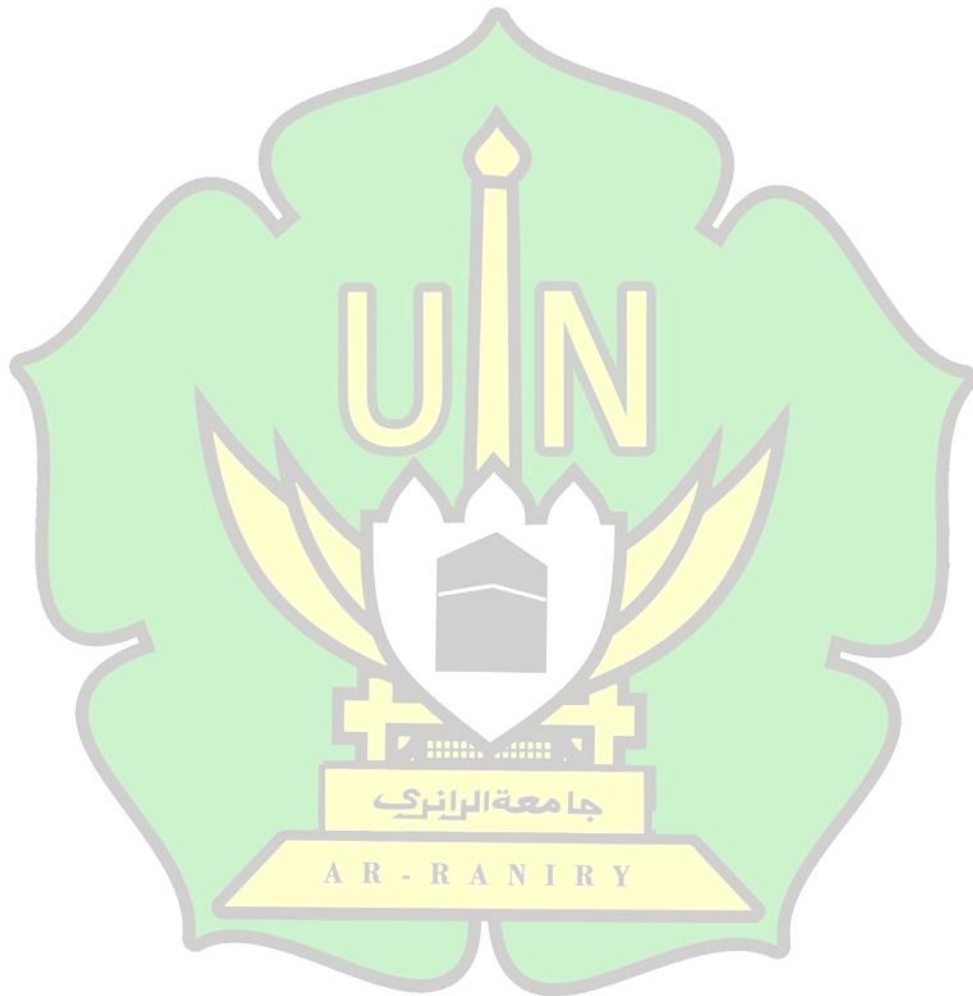
<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>6</b>
2.1 Kajian Pustaka .....	6
2.2 Kerangka Teori.....	9
2.2.1 Teori Konstruksi Sosial dan Teori Politik .....	10
2.2.1.1 Teori Konstruksi Sosial.....	10
2.2.1.2 Teori Politik.....	12
2.2.2 Kerangka Berpikir .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	19
3.2 Informan Penelitian.....	23
3.3 Instrumen Penelitian.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.5 Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
<b>4.1</b> Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	<b>28</b>
4.1.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan .....	29
4.1.2 Visi dan Misi Fakultas .....	31

4.1.3 Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan .....	32
4.1.4 Sarana dan Prasarana Fakultas .....	33
4.2 Hasil Penelitian.....	35
4.2.1 Penyajian Data .....	35
4.2.2 Pengolahan Data .....	36
4.2.3 Interpretasi Data.....	52
4.2.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Sarana dan Prasarana Fakultas .....	34
Tabel 4.2 Daftar Nama Responden Penelitian .....	35



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan Penelitian .....	68
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara.....	69
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	73



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Partai Politik lokal adalah partai yang jaringannya tidak tersebar luas di seluruh negeri, sebaliknya mereka terbatas pada organisasi geografis tertentu. Istilah “ lokalitas” sangat penting dalam mengkarakterisasi partai politik daerah. Terbentuknya partai politik di Provinsi Aceh merupakan cerminan kesadaran masyarakat Aceh akan partai politik kontemporer sebagai wadah perjuangan memobilisasi kekuatan rakyat, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem demokrasi dalam politik nasional.<sup>1</sup>

Menurut Ahmad Farhan Hamid, partai politik lokal adalah partai yang jaringan pendukungnya terbatas pada satu daerah atau lebih, bukan seluruh provinsi di suatu negara.<sup>2</sup> Ketika partai politik daerah Aceh didirikan melalui adanya peraturan perundang-undangan, yang telah diakomodasikan oleh pemerintah dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.<sup>3</sup>

Mahasiswa di masyarakat khususnya yang belajar ilmu politik di UIN Ar-Ranirry Banda Aceh juga turut berbicara dan memahami dinamika politik di Aceh yang sedang berlangsung pada tahun 2024 ini. Mengingat latar belakang intelektual mereka yang beragam, penting untuk memikirkan bagaimana Mahasiswa Aceh akan bereaksi terhadap munculnya partai politik lokal. Tentu

---

<sup>1</sup> (Hardi. 1993:17).

<sup>2</sup> Ahmad Farhan Hamid (2006:33),

<sup>3</sup> Syirwan Haniya, Maimun, “Persepsi Tokoh Mahasiswa Terhadap Partai Aceh (Studi Kasus Tokoh Mahasiswa Usyiah)”, Vol.1, No.1, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Usyiah, Hal.1-2.



saja pemahaman dan tingkat pengetahuan mereka berbeda-beda. Karena kurang mendapat informasi, pemahaman mahasiswa di Banda Aceh terhadap partai politik lokal masih rendah. Mahasiswa dapat memanfaatkan faktor internal seperti kesadaran diri atau motivasi pencarian, serta faktor eksternal seperti keluarga, lingkungan, dan rekan kerja, dan juga keberadaan citra partai, visi, dan misi partai lokal, sebagai informasi untuk membantu mereka mengambil keputusan pada pemilu 2024 yang sudah selesai.<sup>4</sup>

Pasal 11 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan: “partai politik berfungsi sebagai sarana: pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Di Negara asing lainnya seperti Afrika dan Asia Timur, kelompok etnis harus berjuang mendapatkan sumber penghidupan di luar wilayahnya agar bisa maju menuju demokrasi.<sup>5</sup>

Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh juga mengatur tentang pendidikan politik dan mengamanatkan agar partai politik lokal mendidik kadernya dan masyarakat mengenai isu-isu politik. Pernyataan “Partai politik lokal berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat” terdapat pada Pasal 79(a). Lebih lanjut, “Partai Politik Lokal wajib menyelenggarakan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya” tertuang dalam pasal 81(e). Partai

---

<sup>4</sup> Harris Aswansyah, “Konflik Antar Partai Politik Lokal di Aceh ( Studi Penelitian Antara Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh pada Pemilu tahun 2014)”, Vol.4 No.1, Jurnal FISIP Unsyiah, Febuari 2019, Hal.14.

<sup>5</sup> Syaikhu Usman, Politik Lokal di Era Desentralisasi: Menuju Otonomi Rakyat, (Salatiga:Lembaga Penelitian SMERU:2003), Hal.06

politik lokal terbentuk berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani antara pimpinan Gerakan Aceh Merdeka di Finlandia dan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2005. Pendirian partai politik daerah disetujui berdasarkan salah satu ketentuan nota kesepahaman. Sebenarnya, partai-partai yang mempunyai kekuasaan dan kelimpahan saat ini biasanya bergantung pada penguatan fungsi mobilisasi..<sup>6</sup>

Partai Aceh merupakan partai politik lokal Aceh yang pertama kali mencalonkan diri dalam pemilihan umum pada Pemilu Legislatif 2009 dan menang dengan perolehan suara 46,91%, menjadi pemenang pemilu tersebut. Contoh kasus politik mengenai partai lokal yang terjadi pada tahun 2023 tentang caleg untuk pemilu tahun depan, dimana semua Caleg DPRK Banda Aceh dari salah satu partai lokal gugur. Seluruh calon legislatif DPR Kota Banda Aceh (DPRK) yang diusung Partai Darul Aceh (PDA) gagal atau tidak memenuhi kualifikasi, menurut Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh. Mereka gagal karena dokumennya tidak sesuai dan mereka lalai mengikuti tes untuk mengetahui apakah mereka bisa membaca Al-Quran.. Ketua KIP Kota Banda Aceh Yusri Razali mengatakan “ada 80 Bacaleg yang Tidak Memenuhi Syarat sehingga yang kita umumkan dalam Daftar Calon Sementara hanya mereka yang memenuhi prasyaratnya. Ia mengklaim bahwa anggota parlemen yang tidak memenuhi syarat tersebut berasal dari hampir semua partai politik yang mengajukan pencalonan, kecuali satu partai yang seluruh Dewan Legislatifnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ketua KIP kota Banda Aceh Yusri Razali juga

---

mengindikasikan bahwa kegagalan dalam tes kemampuan membaca Al-Qur'an menjadi salah satu dari beberapa alasan mengapa legislator dianggap didiskualifikasi. Selain gagal dalam ujian wajib baca Al-Qur'an, Bacaleg juga mengunggah beberapa dokumen tidak pantas. Misalnya KTP mempunyai nama yang berbeda dengan nama. Lebih lanjut, Yusri mengatakan, partai bisa saja mencalonkan legislator baru untuk menggantikan petahana yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, sejak pendaftaran dibuka, Partai Garuda Banda Aceh belum mengajukan calon legislatif.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa kurangnya pemahaman mahasiswa ilmu politik mengenai partai politik lokal di Aceh. Bahkan ada sebagian asumsi dari mahasiswa yang menganggap politik itu tidak baik dan tidak penting bagi kehidupan mereka begitu pula dengan partai lokal, oleh karena itu beberapa mahasiswa tersebut tidak mau berpartisipasi secara penuh dalam politik. Observasi juga dilakukan kepada beberapa mahasiswa di Aceh, mereka juga menganggap bahwa politik itu tidak banyak membawa pengaruh bagi mereka, secara tidak langsung mereka apatis terhadap ilmu politik atau partai lokal padahal politik dan partai lokal itu sangat mempengaruhi tentang tata cara berjalannya suatu negara. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui pengetahuan mahasiswa tentang ilmu politik atas partai lokal di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Ar-raniry Banda Aceh.

---

<sup>7</sup> Juni Kriswanto, 590 Bacaleg Aceh Gugur Ikut Pemilu 2024 Karena Absen Tes Baca Al-quran, (Banda Aceh: CNN Indonesia), Juni 2023.

## 1.2 Rumusan Masalah

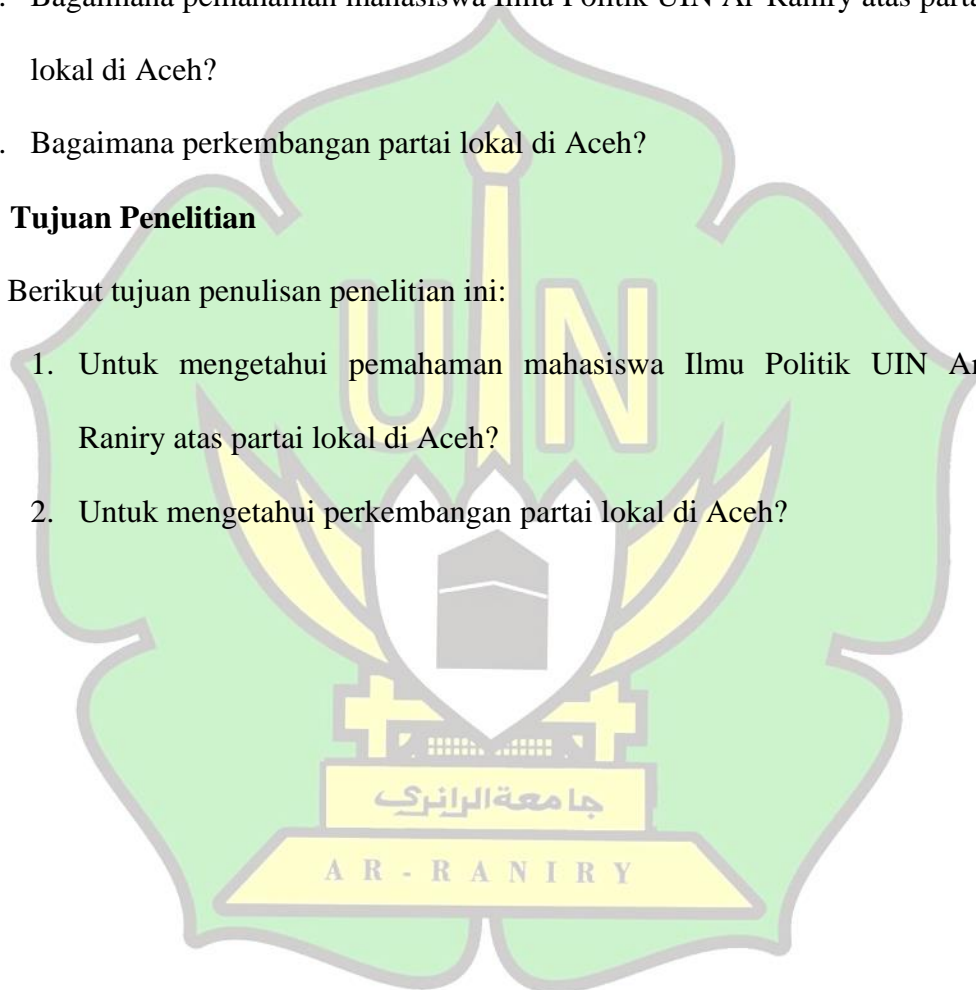
Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, rumusan masalah yang akan peneliti lihat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar-Raniry atas partai lokal di Aceh?
2. Bagaimana perkembangan partai lokal di Aceh?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penulisan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar-Raniry atas partai lokal di Aceh?
2. Untuk mengetahui perkembangan partai lokal di Aceh?



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian merupakan kegiatan penting yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kajian ini bertujuan untuk memahami perkembangan teori, konsep, dan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan melakukan kajian pustaka, peneliti dapat mengetahui apa yang sudah diketahui dalam bidang tersebut dan di mana letak kesenjangan pengetahuan yang ada, yang kemudian menjadi dasar untuk merumuskan tujuan penelitian yang lebih jelas dan terarah.

Proses kajian pustaka juga berfungsi untuk mengidentifikasi metode-metode yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Peneliti dapat memanfaatkan informasi ini untuk menentukan pendekatan yang sesuai dalam penelitian mereka, baik dari segi desain, pengumpulan data, hingga analisis hasil. Selain itu, kajian pustaka membantu peneliti memahami konteks atau latar belakang masalah penelitian dalam perspektif yang lebih luas, serta memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mengembangkan hipotesis dan kerangka teori dalam penelitian.

Dengan melakukan kajian pustaka secara menyeluruh, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak mengulang apa yang sudah dilakukan sebelumnya, melainkan menawarkan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kajian pustaka yang baik juga dapat membantu peneliti dalam menyusun landasan argumentasi yang kuat untuk mendukung hasil



dan kesimpulan penelitian mereka. Oleh karena itu, kajian pustaka bukan hanya sekadar ringkasan literatur, tetapi juga merupakan analisis kritis yang memberikan arah dan relevansi bagi penelitian yang sedang dilakukan.

Kajian pustaka dalam ilmu politik merujuk pada tinjauan atau ulasan terhadap berbagai sumber literatur yang relevan untuk memahami suatu topik atau isu tertentu dalam kajian politik. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menggali teori-teori, konsep, dan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fenomena politik yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ilmiah, kajian pustaka adalah langkah awal yang sangat penting, karena membantu peneliti untuk mengetahui apa yang sudah diketahui sebelumnya tentang topik yang akan diteliti, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan memberikan landasan teoretis untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam kutipan yang dituliskan oleh Rizkika Lhena Darwin, M.A dalam bukunya yang berjudul “Atikulasi Perpolitikan Aceh Pasca-18 Tahun MOU Helsinki” memaparkan bagaimana partai politik lokal berkembang menjadi gerakan sadar politik yang diakui oleh sistem kepartaian nasional di tingkat lokal. Secara umum, partai lokal bermula dari konflik regional yang memerlukan perpecahan karena perbedaan identitas, status kesejahteraan, sejarah, dan faktor lainnya. Kepemimpinan daerah yang kuat dan ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik nasional yang kurang memberikan perhatian terhadap isu-isu lokal



merupakan dua kekuatan utama yang mempengaruhi munculnya partai politik lokal.<sup>8</sup>

“Pengaruh Komunikasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Kota Makassar” adalah judul penelitian yang dilakukan Magfirah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keterlibatan politik masyarakat pada Pilgub Sulawesi Selatan tahun 2018 dipengaruhi oleh komunikasi politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik mempunyai dampak sebesar 35,0% terhadap keterlibatan politik masyarakat pada Pilgub Sulawesi Selatan Kota Makassar tahun 2018.

Komunikasi politik melalui media televisi mempunyai dampak paling besar terhadap keterlibatan politik pada Pilgub Sulawesi Selatan tahun 2018 di Makassar, yaitu sebesar 53,9% dari total keterlibatan.

Selain itu, penelitian bertajuk “Eksistensi Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh dalam Sistem Konstitusi Indonesia (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)” telah dilakukan oleh Zico Furqon pada tahun 2014. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memastikan apakah partai politik lokal ada di Provinsi Aceh dan tempatnya dalam kerangka konstitusi negara Republik Indonesia.

Negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang hanya mengakui partai politik nasional,

---

<sup>8</sup> M.Jafar,dkk.”Artikulasi perpolitikan Aceh (Pasca 18 tahun MOU Helsinki), Banda Aceh: Percetakan Bandar Lamgugob), 2023, Hal 97-100.

namun di Provinsi Aceh juga terdapat partai politik lokal. Temuan studi ini menunjukkan bahwa partai politik lokal di Aceh telah menempatkan diri mereka di dalam kerangka konstitusi negara.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jafar. AW dengan judul “Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” pada tahun 2009. Temuan utama dalam penelitian ini adalah terdapat partai politik lokal yang ikut serta dalam pemilu tahun 2009. Partai tersebut antara lain: Partai Sejahtera dan Keselamatan (PAAS), Partai Kedaulatan Aceh (PDA), Partai Suara Independen Aceh (SIRA), Partai Aceh (PRA), Partai Aceh (PA), dan Partai Aceh Bersatu (PBA). Temuan selanjutnya yaitu ada tiga partai yang mempunyai pengaruh kuat di antara enam partai yaitu PA, PDA, dan PRA.<sup>9</sup>

## 2.2 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian adalah fondasi yang mengarahkan seluruh proses penelitian, yang membantu peneliti dalam merumuskan masalah, mengembangkan hipotesis, serta memilih metode yang tepat. Kerangka teori berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara berbagai konsep atau variabel yang relevan dengan topik yang diteliti. Dengan adanya kerangka teori, peneliti dapat mengorganisasi dan menginterpretasi informasi dari penelitian sebelumnya yang relevan, serta memberikan dasar yang kuat untuk menguji dan menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teori juga berfungsi untuk menunjukkan ruang

---

<sup>9</sup> Muhammad Jafar AW, “Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”,( Semarang: Universitas Diponegoro), 2009.

lingkup penelitian dan bagaimana penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam membangun kerangka teori, peneliti biasanya melakukan kajian pustaka untuk mengidentifikasi teori-teori atau model-model yang sudah ada dalam bidang yang sedang diteliti. Teori-teori ini memberikan panduan mengenai bagaimana variabel-variabel yang ada saling berinteraksi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Selain itu, kerangka teori juga dapat berfungsi untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian, dengan mengaitkan teori yang ada dengan kondisi atau konteks penelitian yang spesifik.

Kerangka teori juga berperan penting dalam mengarahkan peneliti untuk fokus pada variabel-variabel yang relevan, serta menghindari pengumpulan data yang tidak perlu. Dengan kerangka teori yang jelas, peneliti dapat menentukan metode penelitian yang sesuai, memilih instrumen yang tepat untuk mengukur variabel, serta merancang eksperimen atau studi yang sistematis. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang ilmu yang diteliti.

## **2.2.1 Teori Konstruksi Sosial dan Teori Politik**

### **2.2.1.1 Teori Konstruksi Sosial**

Teori konstruksi sosial diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam buku *The Social Construction of Reality* (1996), menekankan bahwa realitas yang dipahami manusia bukanlah sesuatu yang sepenuhnya

objektif atau independen, melainkan dibangun melalui interaksi sosial. Dalam teori ini, individu dan kelompok menciptakan makna bersama melalui proses sosialisasi, komunikasi, dan pengalaman sosial.<sup>10</sup>

Konstruksi sosial terjadi melalui tiga tahap utama yaitu eksternalisasi (penyampaian gagasan ke dunia sosial), objektivikasi (penerimaan kolektif gagasan sebagai kenyataan), dan internalisasi (penghayatan gagasan ke dalam pemahaman individu). Teori konstruksi sosial memungkinkan kita untuk memahami bahwa realitas adalah produk interaksi yang dinamis dan bahwa makna yang diberikan kepada suatu fenomena dapat terus berubah seiring dengan evaluasi nilai-nilai sosial masyarakat.

Dalam teori konstruksi sosial, pemahaman mahasiswa dibentuk oleh pengalaman, diskursus, dan interaksi sosial di lingkungan akademik maupun masyarakat sekitar. Mahasiswa yang terpapar pada sejarah dan konteks keberadaan partai lokal di Aceh seperti perjanjian damai Helsinki 2005 dan pelaksanaan otonomi khusus, cenderung memiliki pemahaman yang lebih komprehensif. Di sisi lain, paparan materi perkuliahan dan literatur akademik mengenai partai politik juga memperkuat kerangka berpikir mahasiswa dalam memahami karakteristik, fungsi, dan tantangan partai lokal di Aceh. (Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam buku *The Social Construction of Reality*, 1996).<sup>11</sup>

Teori konstruksi sosial relevan dalam menjelaskan pemahaman mahasiswa ilmu politik terhadap partai lokal, karena pemahaman tersebut terbentuk melalui

---

<sup>10</sup> The Social Construction of Reality (1996)

<sup>11</sup> Jurnal Analisa Sosiologi, 2020

proses interaksi sosial di berbagai lingkungan, baik akademik maupun non akademik. Melalui perkuliahan, diskusi, dan kegiatan organisasi, mahasiswa terlibat dalam proses eksternalisasi dan internalisasi gagasan tentang peran dan fungsi partai lokal, khususnya di konteks Aceh yang memiliki otonomi khusus. Informasi yang diterima mahasiswa dari dosen, buku teks, media hingga pengalaman langsung menjadi sumber konstruksi realitas tentang keberadaan dan dinamika partai lokal. Proses ini membantu mahasiswa membangun pemahaman tentang bagaimana partai lokal berfungsi sebagai instrument politik daerah yang unik dalam system politik nasional.

Selain itu, pemahaman mahasiswa juga dipengaruhi oleh konteks sosial budaya masyarakat Aceh, yang merupakan lingkungan di mana partai lokal itu beroperasi. Pengalaman sosial, seperti menyaksikan peran partai lokal dalam Pemilu atau mendiskusikan politik lokal dengan masyarakat, berkontribusi pada pembentukan persepsi kolektif tentang efektivitas partai lokal. Melalui teori konstruksi sosial dapat dijelaskan bahwa pemahaman ini bukan sekedar hasil belajar formal, melainkan juga akumulasi interaksi sosial yang memberikan makna pada eksistensi dan peran partai lokal. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami partai lokal tidak hanya sebagai entitas politik formal tetapi juga sebagai representasi aspirasi budaya, identitas, dan politik masyarakat Aceh.

### **2.2.1.2 Teori Politik**

Pada hakikatnya teori berfungsi sebagai peta jalan analisis masalah dalam penelitian karena memudahkan penjelasan bahkan deskripsi masalah oleh peneliti.



Dalam peneitian yang akan berlangsung ini akan menggunakan teori politik, dikarenakan masalah yang diambil menyangkut tentang kepolitikan. Teori politik merupakan suatu usaha untuk memperoleh kedudukan dan kekuasaan terhadap sesuatu.

Teori politik adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari konsep-konsep dasar, prinsip, dan ideologi yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan struktur sosial-politik dalam masyarakat. Teori ini mencakup berbagai pendekatan untuk memahami bagaimana sistem politik berfungsi, mengapa kekuasaan terdistribusi secara berbeda-beda di antara individu dan kelompok, serta bagaimana kebijakan publik dihasilkan dan diterapkan. Beberapa teori politik berfokus pada analisis bentuk-bentuk pemerintahan seperti demokrasi, otoritarianisme, atau monarki, sementara yang lainnya lebih menekankan pada peran ideologi politik dalam membentuk pola-pola politik di masyarakat.

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yang berarti “negara-kota”. Orang-orang di negara-kota Yunani berkomunikasi satu sama lain untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan. Manusia berusaha untuk memastikan tempat mereka dalam masyarakat dengan mencoba mencapai kesejahteraan mereka sendiri dengan sumber daya yang mereka miliki atau dengan membujuk orang lain untuk berbagi pendapat. Mereka sibuk dengan apa yang disebut politik.<sup>12</sup>

Salah satu teori klasik dalam politik adalah teori negara dan kekuasaan yang diajukan oleh filsuf-filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-

---

<sup>12</sup> Budiardjo, M. (1993). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.



Jacques Rousseau. Hobbes, dalam bukunya *Leviathan*, berargumen bahwa manusia pada dasarnya cenderung egois dan bahwa negara dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan mencegah chaos. Sebaliknya, Locke berpendapat bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Sementara Rousseau menekankan pentingnya kehendak umum dan demokrasi langsung dalam menciptakan suatu pemerintahan yang adil. Ketiga pemikir ini memberikan kontribusi penting dalam membentuk pemahaman dasar mengenai teori negara dan hak-hak politik.

Menurut Gabriel A. Almond, politik adalah kegiatan mengendalikan pengambilan keputusan publik dalam suatu masyarakat dan wilayah tertentu. Kontrol ini didukung oleh instrumen yang bersifat otoritatif (yang diberi wewenang secara hukum) dan yang bersifat koersif (yang bersifat memaksa), dan politik adalah penerapan instrumen-instrumen tersebut oleh mereka yang diberi wewenang untuk melakukannya. Lebih lanjut, Budiarto menjelaskan, politik adalah suatu kegiatan yang berlangsung dalam suatu bangsa yang menyangkut penetapan dan pelaksanaan tujuan. Lebih lanjut, Budiarto menggarisbawahi bahwa kepentingan masyarakat secara keseluruhan harus didahulukan sebelum kepentingan atau tujuan diri sendiri (*private goal*).<sup>13</sup>

Ada dua definisi teori politik. Yang pertama adalah bahwa teori politik adalah studi tentang bentuk-bentuk ideal dan metode organisasi masyarakat melalui spekulasi. Teori politik didefinisikan dalam pengertian kedua sebagai pemeriksaan metodis terhadap semua interaksi sosial agar dapat hidup

---

<sup>13</sup> : Almond, G. A. (1960). *The American People and Foreign Policy*. New York: Harcourt Brace.

berdampingan. Selain keterkaitannya sendiri, ilmu politik juga mempunyai keterkaitan dengan bidang studi lain termasuk sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, filsafat, hukum, dan sejarah, tiga bidang yang mempunyai dampak signifikan terhadap politik.<sup>14</sup>

Selain itu, teori politik juga melibatkan berbagai ideologi yang mempengaruhi cara pandang seseorang atau kelompok terhadap sistem politik. Ideologi seperti liberalisme, konservatisme, sosialisme, dan komunisme memberikan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan, bagaimana ekonomi harus diatur, dan apa yang dianggap sebagai keadilan sosial. Liberalism misalnya, menekankan kebebasan individu dan pasar bebas, sedangkan sosialisme lebih memfokuskan pada pemerataan ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial. Setiap ideologi ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk kebijakan politik dan struktur pemerintahan di berbagai negara.<sup>15</sup>

Teori politik juga berkembang dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan di tingkat global. Teori-teori politik kontemporer, seperti teori ketergantungan dan teori sistem dunia, mencoba menjelaskan bagaimana negara-negara di dunia saling berinteraksi dalam hubungan internasional dan bagaimana kekuasaan global terbentuk. Teori politik tidak hanya terbatas pada kajian internal suatu negara, tetapi juga mencakup kajian tentang perang, diplomasi, globalisasi, serta peran organisasi internasional seperti PBB atau IMF dalam mempengaruhi kebijakan global. Dengan demikian, teori politik membantu kita untuk memahami

---

<sup>14</sup> Budiharjo, M. (1992). "Dasar-Dasar Ilmu Politik.

<sup>15</sup> Salie, D. W. (2020). "Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik.

dan menganalisis berbagai fenomena politik baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Secara umum terdapat hubungan erat antara evolusi gagasan politik dan jalannya peristiwa sejarah, sebuah pola yang diakui oleh beberapa peninjau teori politik. Maka jelaslah bahwa perluasan dan pengembangan doktrin-doktrin politik Islam konsisten dengan kejadian ini jika hal ini berlaku pada jenis atau aliran pemikiran tertentu dalam bidang pemikiran apa pun.<sup>16</sup>

### **2.2.2 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian adalah konsep atau panduan yang digunakan untuk merumuskan langkah-langkah dan struktur dalam suatu penelitian. Kerangka berpikir ini berfungsi untuk memberikan arah dan fokus pada penelitian dengan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang ada. Dalam penelitian ilmiah, kerangka berpikir menggambarkan secara sistematis bagaimana fenomena yang diteliti berhubungan satu sama lain, serta dasar teori yang digunakan untuk mendukung analisis data dan pemecahan masalah. Kerangka berpikir menjadi landasan bagi peneliti untuk merumuskan hipotesis, menjelaskan tujuan penelitian, serta menentukan metodologi yang akan digunakan.

Kerangka berpikir biasanya dimulai dengan identifikasi masalah penelitian yang ingin diselesaikan. Setelah itu, peneliti mengembangkan teori atau konsep-konsep yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Dalam

---

<sup>16</sup> Maksum Syahri Lubis, 2008 "Teori Politik" ,(Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area , hal.24.

penelitian sosial, misalnya, kerangka berpikir dapat mencakup berbagai konsep atau variabel yang saling berhubungan, seperti pengaruh pendidikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat atau hubungan antara faktor-faktor sosial dengan perilaku individu. Penentuan konsep dan variabel yang tepat sangat penting dalam kerangka berpikir karena hal ini mempengaruhi proses pengumpulan data dan analisis yang dilakukan.<sup>17</sup>

Selain itu, kerangka berpikir juga membantu peneliti dalam merumuskan desain penelitian yang sesuai. Dengan memiliki kerangka berpikir yang jelas, peneliti dapat menentukan metode penelitian yang akan digunakan, apakah itu penelitian kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran. Selain itu, kerangka berpikir juga memandu peneliti dalam merumuskan instrumen penelitian yang tepat, seperti kuesioner atau wawancara, serta memberikan gambaran umum tentang cara-cara menganalisis data yang diperoleh. Dengan demikian, kerangka berpikir menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang valid dan bermanfaat.

Dengan adanya pengetahuan mahasiswa terutama mahasiswa ilmu politik mengenai partai lokal di Aceh. Peneliti membuat kerangka berpikir dengan menganalisis pengetahuan mahasiswa ilmu politik atas partai lokal di Aceh tahun 2023 yang dilakukan pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan mahasiswa ilmu politik sebagai objek

---

<sup>17</sup> Widayat & Amirullah (2002). "Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif.

untuk penelitian yang akan di lakukan ini yang bertujuan agar membuka wawasan dan pengetahuan baru yang luas.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini juga akan dilakukan beberapa pengalian secara mendalam terhadap pengetahuan mahasiswa ilmu politik terhadap partai lokal di aceh. Dengan demikian, akan diperoleh informasi terkait pemahaman mereka terhadap partai lokal di Aceh.



---

<sup>18</sup> Suharyo, A. (2023). "Analisis Pengetahuan Mahasiswa Ilmu Politik tentang Partai Lokal di Aceh." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu topik, gejala, atau permasalahan tertentu, prosedur penelitian seringkali melibatkan suatu kegiatan ilmiah atau kegiatan yang dilakukan secara bertahap. Langkah-langkah tersebut meliputi pemilihan topik, pengumpulan data, dan analisis data. Dalam bahasa Inggris, istilah “penelitian” mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman baru dan lebih rumit, menyeluruh, dan luas tentang suatu tugas yang perlu diselesaikan.<sup>19</sup>

Metode penelitian memiliki berbagai manfaat yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penggunaan metode penelitian:

1. Menyediakan Bukti yang Valid dan Objektif. Metode penelitian membantu menghasilkan data yang valid dan objektif. Dengan menggunakan prosedur yang sistematis, penelitian dapat mengurangi bias atau subjektivitas dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan Pemahaman. Melalui penelitian, kita dapat memahami fenomena atau masalah secara lebih mendalam. Metode penelitian

---

<sup>19</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) hlm 7.



memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh aspek-aspek yang sebelumnya belum dipahami dengan baik.

3. Menemukan Solusi untuk Masalah. Salah satu tujuan utama dari penelitian adalah untuk memecahkan masalah. Dengan menggunakan metode yang tepat, peneliti dapat menemukan solusi yang efektif untuk masalah yang dihadapi, baik dalam konteks teori, praktek, atau kebijakan.
4. Menambah Pengetahuan. Penelitian memungkinkan kita untuk menambah pengetahuan yang ada dan membuka ruang bagi penemuan baru. Penemuan ini dapat memperkaya bidang ilmu tertentu dan mendorong kemajuan dalam berbagai disiplin ilmu.
5. Meningkatkan Kritis dan Analitis. Metode penelitian mengajarkan peneliti untuk berpikir kritis dan analitis. Proses penelitian melibatkan evaluasi, sintesis, dan interpretasi data yang dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan berbasis bukti.
6. Membantu Pengembangan Teori dan Praktik. Melalui metode penelitian, teori-teori yang ada dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut. Penelitian juga dapat menghasilkan temuan yang dapat diterapkan dalam praktik, seperti dalam dunia pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya.
7. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Tepat. Dalam konteks organisasi atau kebijakan publik, metode penelitian menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan efektif.

8. Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Dalam konteks pendidikan, metode penelitian dapat memperkaya kurikulum dan meningkatkan proses pembelajaran. Penelitian juga memberikan kesempatan kepada siswa dan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan ilmiah yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis.
9. Memperkuat Kepercayaan Publik. Dengan menggunakan metode penelitian yang transparan dan terpercaya, hasil penelitian dapat diterima oleh masyarakat umum, pemerintah, atau kalangan ilmiah lainnya. Ini memperkuat kepercayaan terhadap hasil-hasil penelitian yang dibuat.
10. Membuka Peluang Penelitian Lanjutan. Metode penelitian yang baik sering kali membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut. Hasil temuan yang diperoleh bisa mengarah pada pertanyaan atau hipotesis baru yang memerlukan studi lebih mendalam.

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pernyataan lisan dan tertulis serta tindakan partisipan. Untuk memberikan klarifikasi, peneliti memaparkan definisi pendekatan kualitatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut: Lexy mengutip Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata dan perilaku tertulis atau lisan masyarakat. Menurut Lexy yang mengutip Krik dan Miler, penelitian kualitatif

merupakan tradisi dalam ilmu sosial yang terutama mengandalkan pengamatan manusia, baik kontekstual maupun linguistik..<sup>20</sup>

Peneliti akan mendatangi responden secara langsung atau melakukan wawancara langsung kepada sejumlah mahasiswa, dengan fokus pada program studi Ilmu Politik fakultas FISIP UIN Ar-Ranirry Banda Aceh. Untuk mengumpulkan data dari siswa, peneliti terlebih dahulu akan menyusun sejumlah pertanyaan atau survei yang akan dikirimkan kepada siswa. Hal ini akan membahas pengetahuan siswa tentang partai lokal di Aceh dan kurikulum ilmu politik. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dari hasil wawancara. Penyajiannya bermanfaat bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai salah satu jenis esai ilmiah.

Peneliti juga akan mendapatkan bahan penelitiannya dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pihak lokal. Sumber-sumber ini akan membantu peneliti memperluas keahlian dan pemahamannya terhadap penelitian yang dilakukannya.

### **3.2 Informan Penelitian**

Informan (Mahasiswa) penelitian kualitatif adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang item penelitian yang diminati peneliti. Kriteria yang digunakan peneliti dalam memilih informan harus memastikan bahwa data yang ditawarkan relevan dengan penelitian yang dilakukannya.

Oleh karena itu, berdasarkan kriteria informan yang ditentukan oleh peneliti sendiri harus termasuk mahasiswa prodi Ilmu Politik fakultas FISIP UIN Ar-

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 4

Ranirry Banda Aceh yang menjadi informan yang dibutuhkan oleh peneliti untuk permasalahan dalam penelitian ini.

### **3.3 Instrumen Penelitian**

Data dalam penelitian merupakan hasil dari banyaknya informasi akurat yang dapat diperoleh peneliti melalui wawancara yang dilakukan. Data dikumpulkan oleh peneliti, yang kemudian menggunakannya untuk menarik kesimpulan dan mencapai suatu kesimpulan. Oleh karena itu, data dilibatkan secara aktif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif menggunakan berbagai teknik ilmiah untuk menggambarkan dan menerapkan suatu fenomena yang dialami subjek penelitian dalam latar alamiah yang unik.

Data kualitatif juga dapat dicapai dengan menggunakan wawancara dan sekaligus mewawancarai responden yang terlibat secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan untuk memperoleh data atau hasil yang peneliti inginkan. Selain itu, data juga memiliki peran dalam menjawab atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, dan yang terjadi dalam sebuah penulisan.

Selain itu Sumber data primer dan sekunder merupakan sumber informasi yang akan peneliti gunakan. Data yang berasal dari sumber data pertama atau pertama di lokasi penelitian disebut sebagai sumber data primer. Informasi ini diperoleh dari sumber dokumentasi, wawancara, dan observasi. Peneliti akan berbicara dengan mahasiswa tertentu dari program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Ar-Ranirry Banda Aceh guna mengumpulkan informasi melalui wawancara.

Kemudian data yang dikumpulkan dari sumber sekunder yang memenuhi syarat kata peneliti dikenal dengan sumber data sekunder. Pada bahan sekunder yang diperoleh para sarjana dari buku, jurnal, artikel, atau blog yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukannya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mencapai hasil yang diinginkan dari penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data berikut:

a. Observasi

Metode ini merupakan salah satu tehnik untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pengamatan atau gejala-gejala yang diselidiki. Observasi yang dilakukan untuk memperoleh data tentang pengalaman tersendiri dari mahasiswa Ilmu Politik fakultas FISIP UIN Ar-Ranirry Banda Aceh. Peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung terhadap mahasiswa Ilmu Politik terhadap pengetahuan mereka tentang partai lokal khususnya di fakultas FISIP UIN Ar-Ranirry Banda Aceh.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk dari komunikasi yang verbal yang bertujuan memperoleh suatu informasi yang valid. Jadi, peneliti melakukan komunikasi (tanya jawab) dengan narasumber terhadap pengetahuan mahasiswa ilmu politik tentang partai lokal yang ada di Aceh. wawancara ini juga akan dilakukan untuk mahasiswa Ilmu Politik dari fakultas FISIP UIN Ar-Ranirry Banda Aceh.

c. Dokumentasi



Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data yang lebih asli dan dapat diandalkan untuk dipelajari, dokumentasi sangatlah penting. Peneliti mampu mengamati keadaan atau kenyataan yang terjadi berkat dokumentasi tersebut. Selain itu dokumentasi sebagai salah satu alat pendukung untuk mendapatkan data yang akurat.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan untuk analisis data. Sebagai *human instrument* dalam penelitian kualitatif, tugasnya antara lain memilih fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan dari temuan penelitian yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Selanjutnya data yang dikumpulkan dikategorikan berdasarkan fokus masalah penelitian.

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian, dan peneliti akan menarik kesimpulan dari data tersebut. Kemudian dalam analisis kualitatif terbagi menjadi kedalam empat bagian, yaitu *data collection*, *data reduction*, *display* dan verifikasi data sebagai berikut:

#### a. Pengumpulan data (*data collection*)

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara yang dibantu dengan kuensioner yang akan disusun oleh peneliti. Dalam tahap yang dilakukan ini, peneliti juga membuat sejumlah pertanyaan atau kuesioner secara tersusun guna untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dan secara



sistematis sesuai dengan kebutuhan ataupun target yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

b. Reduksi data (*data reduction*)

merupakan suatu prosedur untuk memilih atau memfilter data. Untuk membantu proses penelitian peneliti, harus dipilih sejumlah data yang dapat dianalisis dan digabungkan menjadi satu informasi. Menyederhanakan data sangat penting untuk tujuan penelitian karena memungkinkan penelitian untuk lebih berkonsentrasi pada data dan membuat lebih banyak referensi ke sistem terpusat. Memadatkannya akan mempermudah pembuatan gambar secara keseluruhan.

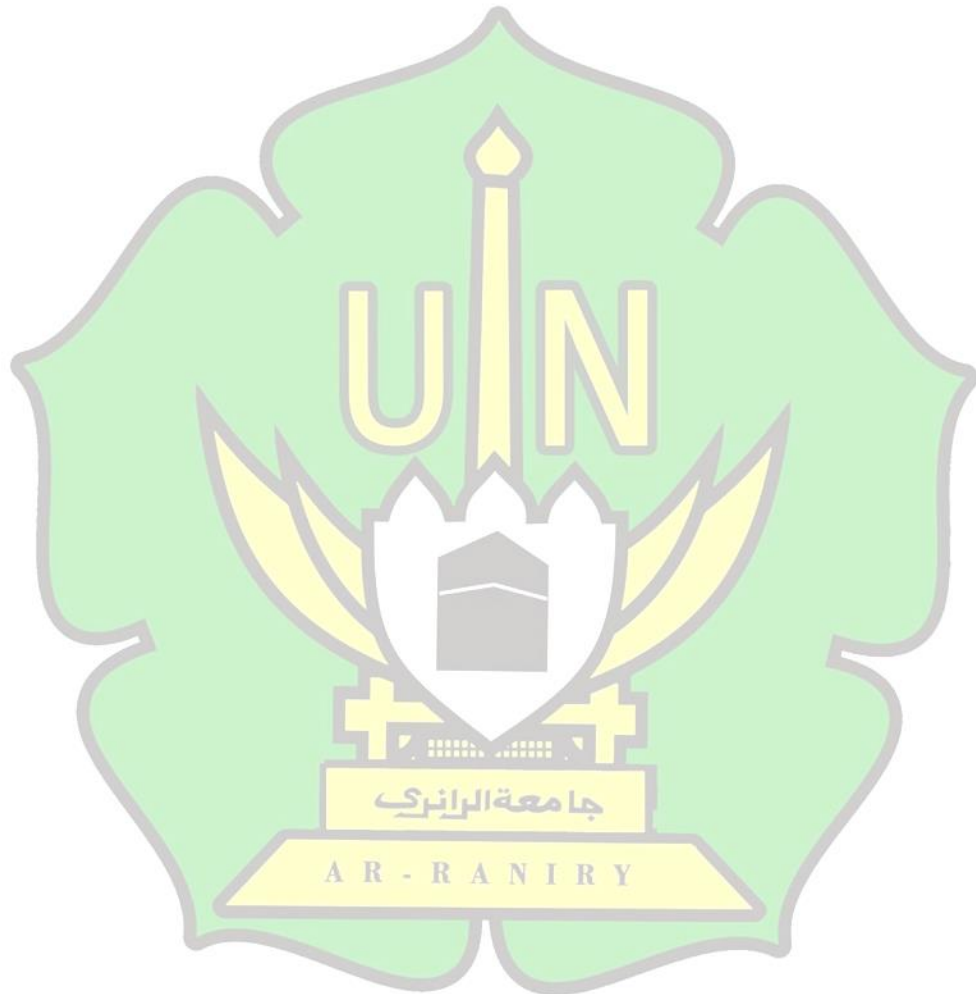
c. Penyajian data (*display*)

Penyajian data (*display*) merupakan deskripsi kumpulan data atau informasi yang terorganisir dan terstruktur yang memungkinkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan tersebut. Teks yang diproduksi dengan gaya naratif digunakan untuk menyajikan data kualitatif. Dalam penelitian ini, penyajian data juga dianggap sebagai fase nyata yang menawarkan gambaran umum data untuk memudahkan pemahaman atas data yang dikumpulkan.

d. Kesimpulan (verifikasi)

Peninjauan data, catatan, dan materi diperlukan untuk menarik kesimpulan (verifikasi) dalam penelitian, dan mendiskusikan ide dengan teman dapat memudahkan proses pembuatan kerangka konseptual. Selain itu, temuan pertama yang diajukan masih bersifat tentatif atau sementara. Sebab, fakta di lapangan menentukan bisa atau tidaknya mengambil kesimpulan. Untuk sampai pada

kesimpulan atau memverifikasi temuan, peneliti mengkaji urutan langkah-langkah penelitian dari awal sampai akhir. Hal ini memungkinkan data diubah menjadi pengetahuan aktual dan validitasnya diverifikasi.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdiri pada tahun 1961 dengan nama awal IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Ar-Raniry, universitas ini memiliki visi untuk menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang keagamaan dan ilmu pengetahuan. Nama "Ar-Raniry" sendiri diambil dari nama seorang ulama besar asal Aceh, Syekh Abdurrauf al-Fansuri, yang dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah peradaban Islam di wilayah tersebut.<sup>21</sup>

UIN Ar-Raniry memiliki berbagai fakultas yang mencakup bidang-bidang ilmu agama dan ilmu umum, seperti Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Dalam upaya mewujudkan tujuan akademik dan sosialnya, universitas ini terus mengembangkan kurikulum yang berbasis pada integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, serta memperkenalkan mahasiswa pada pendekatan keilmuan yang holistik dan interdisipliner.

---

<sup>21</sup> Profil singkat program studi, <https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/profil-uin-ar-raniry> diakses pada tanggal 26 Juli 2024.

Sebagai institusi pendidikan yang berbasis di Aceh, UIN Ar-Raniry memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan agama Islam di kawasan tersebut. Universitas ini tidak hanya fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks dunia akademis, tetapi juga memberikan perhatian besar pada pembentukan karakter mahasiswa yang berbasis pada nilai-nilai keislaman. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang dilaksanakan oleh mahasiswa, seperti pengajian, kegiatan dakwah, serta program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara kampus dan masyarakat sekitar.

UIN Ar-Raniry juga terus berupaya memperluas jangkauan dan kualitas pendidikan dengan menjalin berbagai kerja sama internasional. Kerja sama tersebut melibatkan lembaga pendidikan tinggi luar negeri dan organisasi internasional yang berfokus pada pengembangan keilmuan dan riset. Dengan memiliki fasilitas yang lengkap, seperti ruang kelas modern, perpustakaan digital, serta laboratorium penelitian, UIN Ar-Raniry berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang keilmuan, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan keterampilan yang siap bersaing di dunia global.

#### **4.1.1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh merupakan salah satu fakultas yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan intelektualitas mahasiswa di bidang sosial dan politik. Fakultas ini menawarkan berbagai program studi yang

mencakup ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik, dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam menghadapi dinamika sosial dan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional. FISIP UIN Ar-Raniry juga mengedepankan pengembangan pemikiran kritis dan analitis, serta menanamkan nilai-nilai keislaman dalam setiap kegiatan akademiknya.

Sebagai bagian dari UIN Ar-Raniry yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, FISIP memiliki fasilitas pendukung yang memadai, seperti ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi terkini, perpustakaan dengan koleksi buku yang relevan, serta ruang diskusi yang memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dan berbagi ide. Di samping itu, fakultas ini juga memiliki berbagai program pengabdian masyarakat yang memungkinkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah sosial dan politik di masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun negara.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh juga dikenal aktif dalam menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi internasional. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas wawasan mahasiswa serta memberikan pengalaman praktis yang berguna dalam mengembangkan kemampuan mereka di dunia kerja. Dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu sosial, politik, dan keislaman, FISIP UIN Ar-Raniry menjadi tempat yang tepat bagi mereka yang ingin mempelajari berbagai aspek kehidupan sosial dan politik secara menyeluruh.

Pada tahun 2014 berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) yang berstatus IAIN AR-RANIRY diubah menjadi UIN AR-RANIRY. Dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Aceh yang akhir-akhir ini dilanda situasi konflik yang berkepanjangan, perubahan paradigma pemerintahan daerah Aceh, permasalahan pembangunan sosial dan pemerintahan, serta pengelolaan UIN, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. terinspirasi untuk membuka dengan dua program studi andalan yaitu Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Politik. Pendirian fakultas ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan sosial politik dan pemerintahan yang terjadi di Aceh.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan telah mengawal Departemen Ilmu Politik dan Administrasi Negara dalam menggunakan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam rangka meningkatkan kualitas keluaran mahasiswa. Surat amanah dari Dirjen Pendidikan Tinggi, nomor 384/E.E2/DT/2014, tanggal 25 April 2014, dan surat kesediaan Rektor, nomor Un.07/R/PP.00.9/1656/2014, tanggal 22 April 2014, dijadikan landasan pelaksanaan program ilmu politik.<sup>22</sup>

#### **4.1.2 Visi dan Misi Fakultas**

##### **1. Visi**

Menjadi fakultas riset yang unggul dan berjiwa *entrepreneur* di bidang sosial dan pemerintahan serta mampu berkontribusi aktif dalam penciptaan bangsa yang

---

<sup>22</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, <https://fisisp.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id> diakses pada tanggal 26 Juli 2024.



berbasis islam dengan menghargai kearifan lokal dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2025.

## **2. Misi:**

1. Mengadopsi kurikulum berbasis Islam untuk membantu siswa yang mempelajari ilmu sosial dan pemerintahan mengembangkan pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai Islam, Aceh, dan Indonesia.
2. Menyelenggarakan pengkajian dan penelitian di bidang ilmu politik dan administrasi negara untuk membantu terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat sipil dan demokratisasi.
4. Mengembangkan jaringan kelembagaan berbasis komunikasi dan informasi (TCI) untuk menciptakan sinergi dengan berbagai organisasi formal dan informal.

### **4.1.3 Mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan**

Mereka yang mengejar pendidikan tinggi di perguruan tinggi yang meliputi universitas, institut, sekolah menengah atas, politeknik, akademisi, dan *community college* disebut sebagai pelajar. Seseorang harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu pada tingkat Dasar (SD), Menengah (SMP), dan Atas (SMA/Sederajat) sebelum dapat mendaftar ke sekolah. Di perguruan tinggi, mahasiswa diposisikan sebagai pribadi dewasa yang sadar akan potensi dirinya untuk menjadi pemikir, ilmuwan, praktisi, dan profesional. Selain itu, dikatakan bahwa mahasiswa mempunyai peran penting sebagai agen perubahan.

Mahasiswa diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mengubahnya menjadi lebih baik sebagai individu yang berpendidikan tinggi. Mahasiswa mempunyai peranan penting dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah Indonesia, seperti tragedi orde dahulu dan orde sekarang.

Tanpa adanya mahasiswa/i maka proses perkuliahan tidak akan berjalan lancar, elemen ini sangat penting untuk pelaksanaan proses. perkuliahan di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan tentunya untuk semua fakultas bahkan universitas lainnya.jumlah mahasiswa/i yang berkuliah di fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh keseluruhan Mahasiswa Ilmu Politik berjumlah 290 orang dari angkatan 2017-2023 dan keseluruhan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara berjumlah 520 orang dari angkatan 2017-2023.

#### **4.1.4 Sarana dan Prasarana Fakultas**

Sarana dan prasarana mempunyai dampak terhadap baik tidaknya program perkuliahan fakultas. Berdasarkan data yang dihimpun, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik. Diantaranya kantin, perpustakaan, ruang unit kegiatan mahasiswa, aula, musala, laboratorium, ruang program studi, toilet, tempat parkir, dan taman fakultas. Ketersediaan segala fasilitas tersebut menunjang optimalisasi kegiatan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Tabel 4.1 Daftar Sarana dan Prasarana Fakultas**

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1.	Kantin	1
2.	Perpustakaan	1
3.	Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa	1
4.	Aula	1
5.	Mushola	1
6.	Laboratorium	1
7.	Ruang Program Studi	1
8.	Toilet Dosen	1
9.	Toilet Mahasiswa	1
10.	Parkiran	1
11.	Taman Fakultas	1
12.	Lobi	1

*Sumber data dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 2024*

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Penyajian Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Mahasiswa fakultas ilmu politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh diwawancarai. Sedangkan dokumentasi dilakukan dalam rangka membaca arsip dokumen dan memotret kegiatan selama melakukan penelitian.

Preliminary riset-survey atau penelitian awal mandiri, dimana peneliti mendekati sejumlah Mahasiswa Ilmu Politik yang potensial menjadi responden penelitian ini, dari preliminary riset tersebut peneliti menemukan 11 (Sebelas) responden potensial yang memahami dan bersedia memberikan respon terhadap penelitian ini, mereka adalah:

**Tabel 4.2 Daftar Nama Responden Penelitian**

No	Nama Responden	Prodi/ Jurusan	Angkatan
1	Muhammad Ijlal	Ilmu Politik	2021
2	Nabila Amira Septiana	Ilmu Politik	2021
3	Fadil Ihsan	Ilmu Politik	2021
4	M. Qais Mubarak	Ilmu Politik	2021
5	El Yordan	Ilmu Politik	2021
6	Maulidar Fitri	Ilmu Politik	2020
7	Kurniawan Rizki	Ilmu Politik	2020
8	Rizki Kusuma Chandra	Ilmu Politik	2020
9	Fatimah	Ilmu Politik	2018
10	Cut Yumba Tarisya	Ilmu Politik	2019
11	Putri Zelsi Arisandi	Ilmu Politik	2020

#### 4.2.2 Pengolahan Data

Wawancara dan dokumen digunakan untuk mendapatkan temuan penelitian. Hasil wawancara diperoleh dari 11 (Sebelas) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Pada setiap hasil kegiatan penelitian ditempelkan foto responden yang berfungsi sebagai dokumentasi..

##### a. Partai Lokal Aceh

Partai politik lokal menjadi suatu perjalanan politik menjadi suatu perjalanan politik secara lokal yang di akui system kepartaian di dalam sebuah negara. Perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua daerah memiliki partai lokal sehingga terbentuknya partai lokal berpengaruh pada dinamika politik di masing-masing negara. Kehadiran partai lokal menjadi suatu manifestasi tuntutan mereka mendapatkan keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Seperti pada tahun 1995 bahwasanya regulasi di Indonesia telah diperbolehkan hadirnya partai lokal yang bersifat kedaerahan sebagai kontestan dalam pemilu, didasarkan pada Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 November 1945. Kemudian ide partai lokal Aceh hadir dalam perundingan damai RI-GAM dan disetujui dan dituangkan dalam perjanjian damai MoU Helsinki sehingga pada poin 1.2.1 mengamanatkan kehadiran partai politik lokal yaitu Partai Aceh.<sup>23</sup>

Partai lokal di Aceh merupakan fenomena politik yang unik di Indonesia, mencerminkan keistimewaan daerah ini dalam konteks otonomi dan kekhususan budaya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

---

<sup>23</sup> M. Jafar, dkk, 2023, Artikulasi Perpolitkan Aceh ( Pasca 18 tahun MoU Helsinki Aceh), Banda Aceh, hal. 97-100.

Pemerintahan Aceh, Aceh diberikan otonomi khusus yang memungkinkan daerah ini untuk memiliki partai politik lokal yang berbeda dari partai-partai nasional. Hal ini merupakan wujud implementasi dari Kesepakatan Helsinki 2005 yang berupaya mengakhiri konflik bersenjata di Aceh dan memberi Aceh lebih banyak otonomi dalam urusan pemerintahan dan politik.

Salah satu karakteristik utama partai lokal di Aceh adalah bahwa mereka mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat Aceh secara spesifik. Partai-partai lokal ini seringkali mengusung agenda yang mencerminkan identitas Aceh, baik dalam hal budaya, agama, maupun sejarah. Misalnya, Partai Aceh (PA) adalah salah satu contoh utama partai lokal yang terbentuk setelah kesepakatan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Partai ini memiliki basis dukungan yang kuat dari kalangan mantan kombatan GAM dan pengikutnya, dan ia seringkali berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan perdamaian, pembangunan, serta pelestarian budaya Aceh.

Peran partai lokal di Aceh juga mencerminkan dinamika politik yang berbeda dibandingkan dengan partai-partai nasional. Dalam pemilihan umum, partai lokal memiliki keunggulan dalam hal kedekatan dengan pemilih karena mereka lebih memahami konteks lokal dan memiliki jaringan yang lebih erat dengan komunitas-komunitas di Aceh. Selain itu, mereka seringkali memiliki program-program yang lebih spesifik dan terfokus pada kebutuhan dan harapan masyarakat Aceh. Hal ini memungkinkan mereka untuk menangkap suara-suara



yang mungkin tidak terakomodasi oleh partai-partai nasional yang memiliki cakupan yang lebih luas.<sup>24</sup>

Namun, keberadaan partai lokal juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah potensi fragmentasi politik yang dapat mengurangi kekuatan politik kolektif Aceh di tingkat nasional. Karena partai-partai lokal seringkali terfokus pada kepentingan lokal, ada risiko bahwa mereka mungkin kurang efektif dalam menyuarakan kepentingan Aceh di tingkat nasional. Selain itu, dinamika politik lokal yang intens juga dapat menyebabkan ketegangan internal dan persaingan yang menghambat konsolidasi politik yang lebih luas.

Secara keseluruhan, partai lokal di Aceh memainkan peran penting dalam sistem politik Indonesia dengan menyediakan saluran bagi aspirasi dan kepentingan khusus daerah ini. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai wadah politik, tetapi juga sebagai penjaga dan pelestari identitas budaya serta penyelenggara program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Namun, tantangan-tantangan yang mereka hadapi menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan lokal dan nasional dalam konteks otonomi yang diberikan kepada Aceh.

#### **b. Pengetahuan Mahasiswa Ilmu Politik Tentang Partai Lokal**

Hasil wawancara mengenai pemahaman ilmu politik dan dinamika partai lokal di Aceh memberikan wawasan mendalam mengenai beberapa aspek penting

---

<sup>24</sup> Muhammad Nur Kholis Partai Aceh: Dari GAM Menuju Partai Politik, Partai Aceh: Dari GAM Menuju Partai Politik, (kompas.com).

dalam konteks politik lokal di provinsi Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa/i Ilmu Politik tentang partai lokal di Aceh, mengenai keberadaannya partai lokal di Aceh, ada yang memberikan pendapat yang positif dan sebagainya lagi memberikan pendapat yang negatif. Berikut ini pernyataan dari narasumber mengenai pemahaman mereka tentang partai lokal yang ada di Aceh:

Menurut pendapat yang diungkapkan oleh Fatimah, menurutnya Partai lokal di Aceh merupakan bagian penting dari dinamika politik di provinsi tersebut, mencerminkan keunikan dan aspirasi masyarakat Aceh. Keberadaan partai-partai ini tidak hanya memberikan suara yang lebih mewakili untuk masyarakat Aceh tetapi juga mencerminkan hasil dari proses damai yang dicapai melalui perdamaian dengan Pemerintah Republik Indonesia setelah konflik berkepanjangan.

Dalam konteks ini, partai lokal berperan sebagai jembatan antara kebutuhan lokal dan kebijakan nasional, memungkinkan penyesuaian yang lebih baik terhadap karakteristik dan keinginan masyarakat Aceh. Salah satu contoh partai lokal yang berperan signifikan adalah Partai Aceh. Didirikan sebagai bagian dari implementasi MoU Helsinki, Partai Aceh tidak hanya berfokus pada isu-isu politik, tetapi juga memainkan peran penting dalam pelestarian budaya dan bahasa Aceh. Dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat Aceh, Partai Aceh

berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di wilayah tersebut, sambil menjaga identitas budaya Aceh.<sup>25</sup>

Selain itu, menurut Cut Yumba Tarisyah berpendapat bahwa partai-partai lokal lainnya seperti Partai SIRA (Solidaritas Independen Rakyat Aceh) juga turut berkontribusi dalam peta politik Aceh. Partai ini dikenal karena komitmennya terhadap reformasi dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Dengan pendekatan yang berbasis pada partisipasi masyarakat, Partai SIRA berusaha untuk menciptakan platform politik yang inklusif, di mana setiap suara dari masyarakat Aceh dapat terdengar dan diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan.<sup>26</sup>

Kemudian, Putri Zelsi Arisandi mengatakan partai-partai lokal di Aceh memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal dapat tersampaikan dengan efektif. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai saluran politik, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai lokal dan pemacu perubahan yang sesuai dengan konteks lokal. Keberadaan mereka mencerminkan keragaman dan kompleksitas politik di Aceh, serta komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi provinsi Aceh.<sup>27</sup>

Mahasiswi ilmu politik yang mengatakan bahwa adanya partai lokal di Aceh disebabkan oleh MoU Helsinki, akan tetapi MoU Helsinki dan Undang-

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Fatimah, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, (Angkatan 2018).

<sup>26</sup> Wawancara dengan Cut Yumba Tarisyah, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, (Angkatan 2019).

<sup>27</sup> Wawancara dengan Putri Zelsi Arisandi, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, (Angkatan 2020).

Undang UUPA adalah Undang-Undang keistimewaan untuk Aceh. Partai politik lokal saat ini tidak selaras dengan zaman dahulu yang dimana ketika melihat orang-orang yang masuk berkecimpung kedalam partai lokal bukan lah orang yang menetap di Aceh, akan tetapi orang luar yang bergabung dengan partai lokal”

Sejarah panjang konflik dan perjuangan Aceh mempengaruhi karakter politik partai lokal di Aceh. Kemudian seiring berjalannya waktu sejarah konflik dan perjuangan untuk otonomi khusus menciptakan fondasi bagi partai lokal untuk mempromosikan agenda yang berakar dalam tradisi dan identitas lokal.

Kemudian pendapat dari Muhammad Ijlal mengenai Partai Lokal di Aceh, mengatakan partai lokal suatu partai yang di khususkan untuk daerah Aceh yang memiliki otonomi khusus daerah sehingga partai lokal hanya terbentuk di daerah Aceh saja. Dalam sejarah berjalannya waktu pembentukkan partai lokal di Aceh pertama kali ialah Partai Aceh (PA) yang menjadi salah satu partai yang mencerminkan daerah sendiri yang disebabkan nama dan lambang dalam bendera dari Partai Aceh itu sendiri”<sup>28</sup>

Otonomi khusus memberikan kekuasaan lebih kepada partai lokal untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Otonomi khusus memungkinkan partai lokal untuk beroperasi dengan otonomi lebih besar dalam hal perundang-undangan dan pengelolaan sumber daya, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Aceh.

Selain itu Marni Safitri berpendapat bahwa keberadaan partai politik lokal sangat baik khususnya di aceh, hal ini memeperlihatkan bahwa kedekatan antara

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ijlal (21 tahun), Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

partai lokal dengan masyarakat, Partai politik lokal cenderung lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan partai nasional.<sup>29</sup>

Partai lokal dianggap lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan partai nasional, hal ini dikarenakan partai lokal lebih mengenal kondisi dan aspirasi masyarakat Aceh, mereka bisa lebih efektif dalam mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat setempat seperti halnya keterlibatan langsung dalam pembangunan, partai lokal dapat memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat Aceh

Kemudian M.Qais Mubarak, menurutnya kurangnya regenerasi kepemimpinan di partai lokal sering menjadi masalah. sehingga dalam partai lokal sangat diperlukan regenerasi kepemimpinan.<sup>30</sup>

Hal ini mencerminkan bahwa tanpa proses regenerasi yang efektif, partai lokal bisa terjebak dalam pola kepemimpinan yang stagnan, menghambat inovasi dan perkembangan partai lokal Aceh itu sendiri. Kemudian pendapat lainnya di nyatakan oleh Fadil Ihsan yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik lokal disebabkan karena partai lokal cenderung mendukung kebijakan yang menguntungkan Aceh.<sup>31</sup>

Dukungan terhadap kebijakan lokal yang relevan membantu partai lokal memperkuat basis dukungannya di masyarakat dengan menunjukkan komitmen terhadap kepentingan daerah.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Marni Safitri, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.(angkatan 2021)

<sup>30</sup> Wawancara dengan M. Qais Mubarak, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.(angkatan 2021)

<sup>31</sup> Wawancara dengan Fadil Ihsan, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.(angkatan 2021)



Dikarenakan optimisme masyarakat yang semakin meningkat terhadap kemajuan daerah Aceh, partai politik lokal kerap muncul sebagai kekuatan baru di kancah politik. Akibatnya, politik di Aceh saat ini, khususnya yang dijalankan oleh beberapa partai politik kecil, sedikit kewalahan dalam hal persaingan dengan partai-partai besar. Hal ini ditunjukkan dengan runtuhnya partai lama dan berdirinya partai baru yang ternyata juga memiliki beberapa tokoh politik dari partai lama. Jadi, jika hanya ada satu pihak berkuasa yang berkuasa, hal ini dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan.

Pengetahuan mahasiswa tentang partai lokal khususnya di Aceh sendiri sering juga mencakup pemahaman mengenai peran dan fungsi partai tersebut dalam sistem politik yang lebih besar dan luas. Kemudian mahasiswa yang tertarik pada politik lokal mungkin mempelajari juga bagaimana partai lokal itu melakukan rancangan dan beroperasi, termasuk juga upaya dan strategi mereka dalam meraih dukungan dari masyarakat, serta tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam konteks persaingan dengan berbagai partai nasional.

Selain itu mereka juga mampu melakukan eksplorasi dalam dampak partai lokal terhadap kebijakan publik dan pembangunan komunitas, serta juga berbagai cara partai-partai ini mempengaruhi proses demokrasi di tingkat lokal. Pengetahuan yang membantu mahasiswa memahami dinamika politik lokal dan bagaimana partai-partai tersebut berkontribusi terhadap representasi politik dan perkembangan dalam pembangunan daerah.



Hasil wawancara ini mencerminkan berbagai aspek yang mempengaruhi dan membentuk dinamika politik partai lokal di Aceh. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini dapat membantu dalam merumuskan strategi politik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Aceh. Partai lokal seringkali menghadapi tantangan dalam pengembangan kapasitas organisasi. Keterbatasan dalam pengembangan kapasitas organisasi dapat menghambat efektivitas partai dalam melaksanakan fungsi-fungsi politik dan administratif yang kompleks.

### **c. Perkembangan Partai Lokal di Aceh**

Partai lokal dan partai nasional memiliki perbedaan mendasar dalam hal cakupan, tujuan, dan basis dukungannya. Partai lokal, seperti yang ada di Aceh, biasanya beroperasi dalam lingkup geografis tertentu dan fokus pada isu-isu yang spesifik bagi daerah tersebut. Mereka lebih dekat dengan masyarakat lokal dan seringkali didirikan untuk menangani kebutuhan serta aspirasi khusus dari komunitas tersebut. Misalnya, Partai Aceh didirikan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat Aceh pasca-konflik dan berupaya menjaga serta memperjuangkan identitas budaya dan otonomi daerah. Fokus ini memungkinkan partai lokal untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu lokal dan merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat.<sup>32</sup>

Di sisi lain, partai nasional memiliki cakupan yang lebih luas, biasanya mencakup seluruh wilayah negara. Tujuan utama mereka adalah untuk

---

<sup>32</sup>Larry Diamond dan Richard Gunther, *Political Parties and Democracy*", hal. 54.

merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berlaku secara nasional, mengakomodasi kepentingan dari berbagai daerah dan kelompok masyarakat yang beragam. Partai nasional seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atau Partai Golkar berusaha untuk menciptakan kebijakan yang bersifat universal dan mengatasi isu-isu yang mempengaruhi seluruh negara, bukan hanya satu daerah tertentu. Hal ini seringkali mengharuskan partai nasional untuk mengimbangi kepentingan yang berbeda-beda dari berbagai daerah dan latar belakang masyarakat.

Perbedaan juga terlihat dalam basis dukungan dan struktur organisasi. Partai lokal biasanya memiliki basis dukungan yang kuat dari masyarakat di daerah tertentu dan seringkali memiliki struktur yang lebih sederhana dan terfokus. Mereka dapat lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan lokal. Sebaliknya, partai nasional umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dengan cabang-cabang di seluruh negara, serta dukungan dari berbagai kelompok dan daerah. Karena fokusnya yang lebih luas, partai nasional cenderung menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kepentingan dari berbagai daerah yang mungkin memiliki prioritas yang berbeda.<sup>33</sup>

Perkembangan partai lokal di Aceh menunjukkan dinamika politik yang khas dalam konteks otonomi khusus yang diberikan kepada daerah tersebut. Setelah diterapkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada tahun 2006, yang memberikan wewenang lebih besar kepada Aceh dalam mengatur urusan

---

<sup>33</sup> National vs Local Political Parties: The Dynamics of Representation and Policy Making, dalam *Journal of Politics*. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perbedaan struktur dan tujuan antara partai lokal dan nasional mempengaruhi pembuatan kebijakan.

rumah tangganya, muncul berbagai partai politik lokal sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mewakili kepentingan masyarakat Aceh secara lebih spesifik.

Partai-partai lokal ini, seperti Partai Aceh, yang merupakan kelanjutan dari Gerakan Aceh Merdeka, memainkan peran krusial dalam politik lokal, dengan fokus pada pemenuhan aspirasi politik dan budaya masyarakat Aceh. Keberadaan partai-partai lokal ini juga mencerminkan pergeseran dari dominasi partai nasional terhadap penguatan struktur politik yang lebih bersifat lokal dan regional.<sup>34</sup>

Partisipasi partai lokal Aceh dalam pemilihan legislatif Indonesia mengalami fluktuasi yang mencerminkan perubahan dinamika politik di daerah tersebut. Berikut adalah gambaran umum persentase partisipasi partai lokal Aceh dalam beberapa pemilihan legislatif terbaru:

1. Pemilihan Legislatif 2004: Pada pemilu ini, partai lokal Aceh seperti Partai Aceh baru mulai terlibat aktif setelah otonomi khusus diterapkan. Partai-partai lokal, termasuk Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh, mengumpulkan sekitar 20% hingga 25% dari total suara di Aceh, mencerminkan minat dan dukungan lokal yang signifikan terhadap representasi lokal.
2. Pemilihan Legislatif 2009: Partai lokal Aceh menunjukkan peningkatan perolehan suara, dengan Partai Aceh mendapatkan sekitar 30% dari total suara di Aceh. Keberhasilan ini menggambarkan keberhasilan mereka dalam menarik dukungan luas dari masyarakat Aceh pasca-konflik.

---

<sup>34</sup> John A. McGarry, "Aceh's Quest for Peace: The Role of Local Political Parties", hal 1-18.

3. Pemilihan Legislatif 2014: Persentase suara untuk partai lokal Aceh mengalami penurunan ringan, dengan Partai Aceh memperoleh sekitar 27% dari total suara di Aceh. Meskipun ada penurunan, partai lokal masih tetap menjadi pemain utama dalam politik Aceh.
4. Pemilihan Legislatif 2019: Partai lokal mengalami penurunan lebih lanjut, dengan perolehan suara Partai Aceh menurun menjadi sekitar 23%. Tantangan dari partai nasional yang lebih kuat serta dinamika politik lokal berkontribusi pada penurunan ini.
5. Pemilihan Legislatif 2024: Data terbaru menunjukkan bahwa partai lokal Aceh memperoleh sekitar 25% dari total suara di Aceh, menunjukkan stabilitas relatif meskipun persaingan ketat dengan partai-partai nasional.

Persentase ini menggambarkan bagaimana partai lokal Aceh beradaptasi dengan perubahan politik dan berusaha mempertahankan relevansi mereka dalam struktur politik yang lebih luas di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan ini, partai-partai lokal di Aceh telah menjadi aktor utama dalam lanskap politik daerah, berupaya untuk memperjuangkan hak-hak istimewa Aceh dan mengelola dana otonomi khusus dengan lebih efektif. Mereka sering kali menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, berupaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Aceh.

Namun, tantangan tetap ada, seperti bagaimana partai-partai lokal ini bisa mengatasi konflik internal dan meningkatkan kapasitas manajerial mereka untuk memastikan bahwa kekuasaan dan sumber daya yang ada benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Perkembangan ini mencerminkan upaya yang terus-menerus untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.<sup>35</sup>

Kemudian terkait tentang perkembangan partai lokal, Kurniawan Rizky juga memberi pendapatnya yaitu perkembangan partai lokal saat ini sudah sangat signifikan, bahwasannya dulu secara historis partai lokal sangat susah diajak bergabung dengan partai nasional, mereka dengan optimis yang sangat kuat mereka mengatakan bahwasannya partai lokal akan tetap menjadi partai lokal tidak bisa berkualifikasi dengan partai nasional namun pada saat ini kita lihat fenomena yang terjadi pada pemilu 2024 dimana sejumlah partai lokal itu merapat ke partai nasional seperti partai aceh yang bergabung dengan partai nasional seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, lalu juga ada partai PNA yang sangat jauh signifikannya kalau pada tahun kemarin PNA itu hanya berfokus pada wilayahnya sendiri, namun pada saat ini PNA bergabung dengan partai UMMAT sehingga perkembangannya sudah sangat signifikan.”<sup>36</sup>

Partai-partai lokal di Aceh semakin aktif dalam melibatkan masyarakat dalam proses politik melalui berbagai cara, seperti forum terbuka, konsultasi publik, dan

---

<sup>35</sup>Rinaldi S. dan Rahmat H, "Local Politics and Political Parties in Aceh: The Impact of the Peace Process,". Artikel ini menawarkan tinjauan tentang bagaimana proses damai dan otonomi khusus mempengaruhi politik lokal dan partai-partai di Aceh.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Kurniawan Rizky, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, (angkatan 2020).



penggunaan media sosial. Keterlibatan ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap keputusan politik. Peningkatan partisipasi masyarakat juga membantu partai lokal lebih memahami dan merespons kebutuhan serta aspirasi publik secara lebih efektif. Regenerasi kepemimpinan di partai-partai lokal Aceh mengalami stagnasi, yang dapat menghambat inovasi dan dinamika politik.<sup>37</sup>

Banyak partai lokal di Aceh menghadapi tantangan dalam proses regenerasi kepemimpinan, dengan kepemimpinan yang sering kali didominasi oleh tokoh-tokoh lama. Hal ini dapat menghambat inovasi dan pembaharuan dalam partai, serta mengurangi kemampuan partai untuk beradaptasi dengan perubahan politik dan sosial. Tanpa adanya regenerasi yang efektif, partai lokal bisa kehilangan relevansi dan dukungan masyarakat, serta menghadapi masalah internal yang merugikan.

Kemudian pendapat lainnya dari El Yordan, yang membahas tentang perkembangan partai lokal berkaitan terhadap pengaruh Otonomi Khusus terhadap Strategi Politik yang mana Otonomi khusus memberikan kelebihan dan tantangan tersendiri bagi partai-partai lokal di Aceh dalam merumuskan dan melaksanakan strategi politik.<sup>38</sup>

Jadi, Otonomi khusus memungkinkan partai lokal di Aceh untuk merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan konteks lokal dan aspirasi masyarakat. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan dalam hal manajemen

---

<sup>37</sup> Wawancara Mahasiswi Jurusan Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh,(angkatan 2020).

<sup>38</sup> Wawancara dengan El Yordan, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh,(angkatan 2021)



sumber daya dan konflik kepentingan. Partai-partai lokal harus menavigasi keseimbangan antara kebutuhan lokal dan tekanan dari pemerintah pusat, yang bisa mempengaruhi strategi politik dan kebijakan yang diambil.

Selain itu pendapat dari perkembangan partai lokal juga di berikan oleh Maulidar Fitri yang mengatakan bahwa dalam partai-partai lokal konflik internal sering kali berkisar pada perbedaan visi dan strategi di antara faksi-faksi yang ada. Ketidakstabilan ini dapat mempengaruhi efektivitas partai dalam menjalankan fungsi-fungsinya dan dalam memenangkan dukungan masyarakat. Untuk menjaga stabilitas dan efektivitas, partai-partai lokal perlu mengelola konflik internal dengan bijaksana dan mendorong kerjasama di antara anggotanya.<sup>39</sup>

Kemudian menurut Rizky Kusuma Chandra, jika dilihat dari perkembangan sekarang bahwa partai politik yang di Aceh sekarang lebih mementingkan kepentingan perorangan dari para politikus dibandingkan masyarakat umumnya.<sup>40</sup>

Pendapat-pendapat ini menggambarkan berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan partai-partai lokal di Aceh dan memberikan wawasan tentang tantangan serta peluang yang ada.

Partai lokal di Aceh telah menunjukkan kekuatan mereka dalam berbagai pemilihan umum. Pada pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, partai lokal sering kali menjadi pesaing utama, mengalahkan partai nasional dalam beberapa kasus. Partisipasi pemilu begitu menunjukkan kekuatannya dalam

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Maulidar Fitri, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, (angkatan 2020).

<sup>40</sup> Wawancara dengan Rizky Kusuma Chandra, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, (angkatan 2020).

sejumlah pemilu. Partai-partai lokal sering kali menjadi kandidat terdepan dalam pemilihan anggota parlemen dan kepala daerah, bahkan kadang-kadang mengalahkan partai-partai nasional dalam prosesnya. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap partai lokal, yang dianggap lebih mengetahui permasalahan mereka.

Selain itu, meskipun memiliki kekuatan yang besar, partai-partai lokal terus menghadapi persaingan sengit dari partai-partai nasional, yang seringkali memiliki sumber daya yang lebih besar. Hal ini mungkin berdampak pada kapasitas partai lokal untuk mendapatkan dukungan yang cukup di tingkat provinsi dan federal. Masyarakat Aceh semakin memberikan tekanan kepada partai-partai lokal untuk mempertimbangkan keinginan mereka, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum Islam. Jika permintaan ini tidak dipenuhi, partai lokal bisa kehilangan dukungan dan popularitas.

Dalam tingkat perkembangan partai lokal ini memang sangat beragam tergantung pada konteks politik dan sosial didalam suatu daerah. Namun partai lokal sering kali menghadapi tantangan dalam membangun dukungan yang luas, lebih di utamakan ketika mereka mencoba naik dengan partai nasional yang lebih mapan dan memiliki sumber daya lebih besar. Namun, partai lokal juga punya keunggulan dalam memahami kebutuhan spesifik komunitas mereka dan bisa lebih responsif terhadap isu dan berita lokal.

Keberhasilannya mereka sering kali memiliki keterkaitan pada seberapa baik mereka dapat menggabungkan visi lokal dengan strategi politik yang efektif, serta

dalam kemampuan mereka untuk mobilisasi dan menyuarakan kepentingan konstituen mereka dengan cara yang relevan dan punya kekuatan saing.

#### **4.2.3 Interpretasi Data**

Hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa/i ilmu politik dapat diketahui bahwa pengetahuan mengenai partai lokal yang ada di Aceh sudah sangat banyak yang mengetahuinya dengan berbagai pendapat dan asumsi dari mereka baik itu yang mengarah ke hal yang positif maupun yang mengarah ke hal yang negatif. Salah satu pendapat narasumber mengatakan jika dalam partai-partai lokal sering terjadi konflik internal berupa perbedaan visi dan strategi di antara fraksi-fraksi yang ada, hal tersebut membuat ketidakstabilan dalam menjalankan tugas dan memenangkan dukungan dari masyarakat.

Namun terlepas dari konflik internal tersebut, para narasumber berharap dengan adanya partai lokal di Aceh menjadi suatu hal yang baik bagi masyarakat Aceh itu sendiri dalam mengapresiasi pendapat mereka mengenai politik di Aceh.

Keberadaan partai lokal di Aceh sudah sangat signifikan, secara historis partai lokal sangat susah diajak bergabung dengan partai nasional, mereka dengan optimis yang sangat kuat mereka mengatakan bahwa partai lokal akan tetap menjadi partai lokal tidak bisa berkualifikasi dengan partai nasional. Akan tetapi pada saat ini fenomena yang terjadi pada pemilu 2024 dimana sejumlah partai lokal itu merapat ke partai nasional.

Namun dibalik berkembangnya partai lokal ada juga masyarakat yang belum sepenuh percaya dengan partai politik lokal itu sendiri, hal ini dikarenakan masyarakat sudah lebih pandai dalam menilai kinerja-kinerja partai politik lokal yang ada, dengan kata lain adanya stigma negative terhadap partai politik lokal yang berkembang dalam masyarakat, dimana masyarakat meyakini jika partai politik lokal lebih mementingkan kepentingannya sendiri di banding dengan kepentingan daerah dan masyarakat.

#### **4.2.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

Dalam sistem politik Indonesia, partai politik lokal bukanlah hal baru. Berdasarkan Keputusan Wakil Presiden Nomor Sedang, aturan di Indonesia memperbolehkan partai politik lokal dan daerah untuk mencalonkan diri pada pemilu tahun 1995. Partai kecil dengan cakupan nasional dan organisasi kecil dengan cakupan regional juga diperbolehkan.<sup>41</sup>

Larangan Presiden Soekarno pada tahun 1959 terhadap partai politik etnis mengakhiri sejarah partai lokal. Partai politik besar menarik beberapa elite partai lokal. Di Aceh, partai lokal baru muncul kembali setelah reformasi, terutama setelah MoU Helsinki pada tahun 2006. Pada perundingan damai RI-GAM, gagasan ini mengemuka. Secara khusus, konsep keterlibatan politik dalam partai lokal yang dituangkan dalam kesepakatan damai MoU Helsinki telah disetujui dalam negosiasi tersebut. Ketentuan terkait juga diatur dalam beleid tersebut: Prinsip, tujuan, dan operasional partai politik lokal harus berpegang pada aturan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 pasal 77.

---

<sup>41</sup> Feith, H. (1999). Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Jakarta: Gramedia

Partai politik lokal menjadi salah satu alat negosiasi politik, menjadi mekanisme untuk menetralkan ambisi separatis dan memastikan Aceh tetap menjadi bagian dari Indonesia.<sup>42</sup> Pada pemilu 2009 untuk pertama kalinya partai politik lokal resmi menjadi kontestan pemilu. Berbeda dengan pemilu 1955, partai lokal hanya bisa menjadi kontestan pemilu parlemen lokal baik DPR Aceh (Provinsi) maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Partai politik lokal punya cara untuk memenangkan hati masyarakat saat pemilu. Misalnya saja sentimen anti-Jakarta atau cerita tentang sejarah Memorandum Helsinki dan otonomi khusus demi meraih kekuasaan politik.<sup>43</sup> Perolehan suara partai lokal sangat dinamis, sejak berlangsungnya pemilu 2009 hingga 2019 perolehan suara partai lokal secara keseluruhan mengalami penurunan. Perolehan suara tersebut menurun mulai dari 50,7% pada pemilu 2009, 49% pada pemilu 2014 hingga mencapai 33% pada pemilu 2019.

Penelitian menunjukkan bahwa sejumlah faktor, termasuk konflik internal, kinerja partai lokal yang buruk, pendanaan yang tidak memadai, pendidikan politik yang tidak memadai, integritas partai yang terganggu, sumber daya manusia yang tidak memadai untuk elit partai, dan manajemen organisasi yang tidak kompeten, semuanya berkontribusi terhadap penurunan dukungan terhadap partai lokal. Selain itu, karena mereka hanya dapat diwakili di DPRD, partai lokal mempunyai kekuasaan yang lebih kecil dibandingkan partai nasional. Untuk

---

<sup>42</sup> Hilman, B. (2012). Ethnic politics and local political parties in Indonesia. *Asian Ethnicity*, 13(4), 419-440. <https://doi.org/10.1080/14631369.2012.710078>

<sup>43</sup> Patock, R. (2010). From Rebels to Rulers and Legislator: The Political Transformation of the Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia. *Southeast Asian Studies*. 29 (1), 95-120



memperoleh kekuasaan di tingkat federal, partai lokal harus mengembangkan kemitraan dengan partai nasional.

Namun demikian, belum ada contoh sempurna bagaimana partai-partai nasional dan lokal dapat bekerja sama untuk menentukan kebijakan di Aceh. Dalam sistem kepartaian di Indonesia, kerja sama politik sering kali diamati dan diakui sebagai koalisi pada pemilu DPR RI. Seperti yang ditunjukkan oleh Partai Demokrat pada Pemilu 2009 dan Partai Gerindra hingga Pemilu 2019, partai nasional kerap meraih kursi di DPR RI ketika beraliansi dengan partai lokal, dalam hal ini Partai Aceh.

Meskipun mempunyai tujuan yang sama, partai-partai lokal mempunyai tujuan yang berbeda-beda tergantung negaranya. Tujuan partai lokal terbagi dalam tiga kelompok. Pertama, partai politik daerah yang menjunjung tinggi dan memajukan hak-hak kelompok minoritas tertentu dalam bidang ekonomi, masyarakat, budaya, bahasa, dan pendidikan. Kedua, kelompok lokal yang mendukung dan memperluas hak otonomi daerah saat ini atau yang mengupayakan otonomi untuk daerahnya sendiri.

Ketiga, partai-partai daerah secara terbuka mengadvokasi kemerdekaan daerahnya dan pembentukan negara baru. Mirip dengan Aceh, partai-partai lokal telah berkembang menjadi mesin demokrasi untuk memajukan kepentingan masyarakat Aceh di tingkat pemerintahan nasional.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Tornquist, E. O., Stanley A. P & Teresa Birks. (2010). Aceh The Role of Democracy for Peace and Reconstruction. Yogyakarta: PCD Press Indonesia



Ma'asan Mayrudin menjelaskan bahwa terdapat pergeseran posisi ideologis partai politik pada Pemilu 2014. Ia menawarkan 3 kategorisasi, yaitu: konservatif, konservatisme progresif dan ekstremis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, argumentasi yang ingin ditawarkan dalam tulisan ini adalah terdapat kebutuhan elektoralis yang mempengaruhi dinamika dan variasi ideologi partai lokal.

Analisis terkait ideologi menjadi dimensi yang menarik untuk dianalisis, mengingat kehadiran partai lokal tidak terlepas dari kepentingan identitas kewilayahan/etnis (etnonasionalisme), baik hal itu didasarkan pada perbedaan budaya, bahasa, etnis, agama dan sebagainya. Sehingga partai lokal menjadi berbeda dengan partai nasional.<sup>45</sup>

Definisi para ahli cukup bervariasi di antara partai-partai lokal. Struktur partai yang berlaku di setiap negara benar-benar menentukan bagaimana setiap definisi digunakan. Sederhananya, partai lokal adalah organisasi politik yang didirikan, berkantor pusat, dan mengadvokasi kepentingan lokal. Akibatnya, ada dua sistem untuk partai lokal. Pada awalnya, partai lokal dibatasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk tujuan memilih pemimpin daerah dan anggota legislatif karena terbatasnya struktur partai lokal. Kedua, adanya sistem kepartaian lokal yang terbuka, yang memungkinkan partai lokal untuk

---

<sup>45</sup> Ma'asan Mayrudin, Y. (2017). DINAMIKA PARTAI POLITIK DAN POSITIONING IDEOLOGI: STUDI TENTANG PERGESERAN POSITIONING IDEOLOGI PARTAI-PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014. In *Journal of Governance* (Vol. 2, Issue 2).

mencalonkan diri dalam pemilihan umum nasional untuk jabatan seperti presiden atau kepala negara dan anggota legislatif pusat.<sup>46</sup>

Secara fungsi, partai lokal memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan partai nasional. Abdul Rashid Moten dan Syed Serajul Islam dalam bukunya menggambarkan beberapa fungsi penting partai politik, dengan maksud membantu membuat sistem politik bekerja lebih efisien dan efektif<sup>47</sup> yaitu:

1) Saluran bagi masyarakat dan pemerintah. Di sini, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga eksekutif. Demokrasi langsung merupakan gagasan yang menantang untuk diterapkan di suatu negara bangsa; Oleh karena itu, demokrasi perwakilan muncul sebagai sarana membina hubungan antara masyarakat dan negara. Organisasi formal, partai politik, diperlukan untuk terselenggaranya demokrasi perwakilan antara rakyat dan pemerintahnya.

2) Kepentingan datang bersamaan. Melalui kontestasi pemilu resmi, partai politik memperoleh kekuasaan. Begitu berkuasa, mereka harus merumuskan kebijakan yang menyeimbangkan tuntutan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat.

3) Sosialisasi ke politik. Sepanjang kampanyenya, partai politik berupaya mendidik masyarakat tentang politik dan membantu mereka memahami program mereka..

---

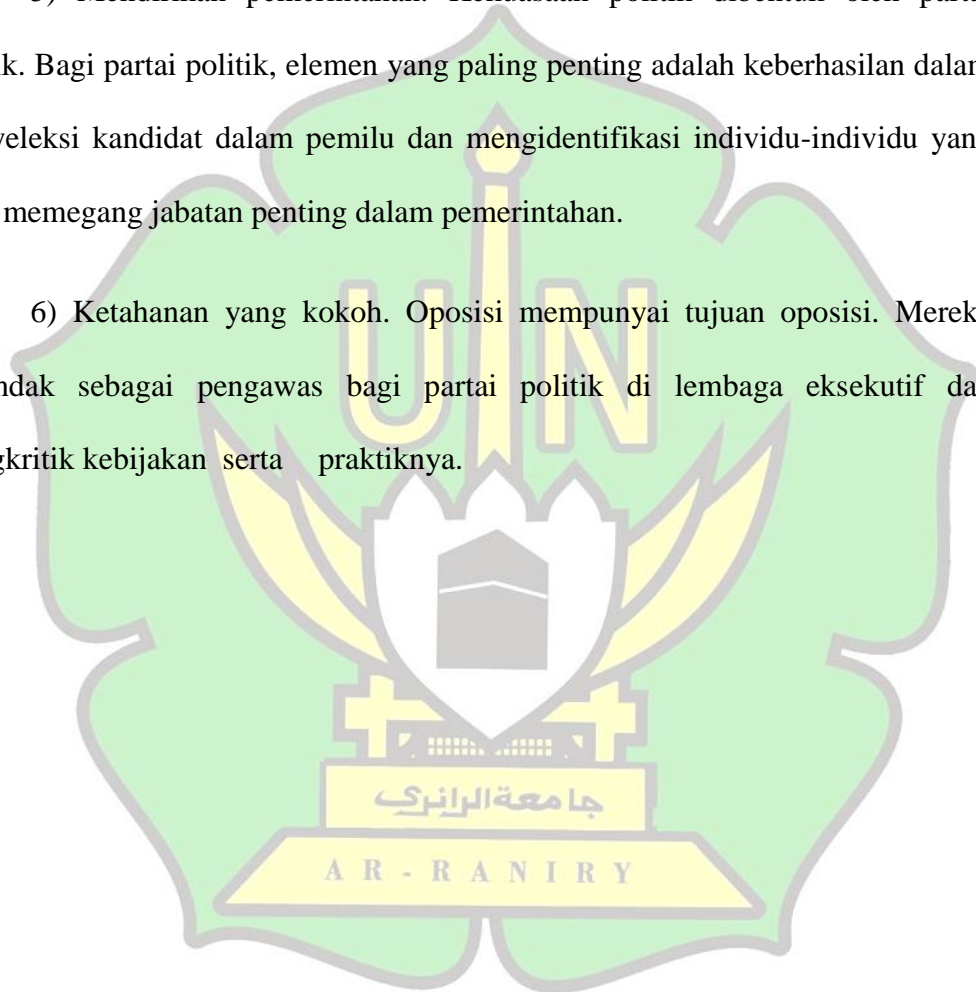
<sup>46</sup> Hamid, A. F (2008). Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan. Jakarta: Kemitraan.

<sup>47</sup> Abdul Rashid Moten dan Syed Serajul Islam. 2005. Introduction to Political Science. Singapore: Thomson Learning.

4) Mobilisasi pemilih. Mengorganisir masyarakat dan memenangkan hati mereka dengan surat suara mereka adalah peran paling jelas yang dimainkan oleh partai politik dalam pemilu.

5) Mendirikan pemerintahan. Kekuasaan politik dibentuk oleh partai politik. Bagi partai politik, elemen yang paling penting adalah keberhasilan dalam menyeleksi kandidat dalam pemilu dan mengidentifikasi individu-individu yang akan memegang jabatan penting dalam pemerintahan.

6) Ketahanan yang kokoh. Oposisi mempunyai tujuan oposisi. Mereka bertindak sebagai pengawas bagi partai politik di lembaga eksekutif dan mengkritik kebijakan serta praktiknya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Partai lokal di Aceh mewakili ciri khas daerah Aceh dan merupakan fenomena politik yang unik di Indonesia. Aceh telah diberikan otonomi khusus dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memungkinkan daerah ini untuk membentuk partai politik lokal yang berbeda dari partai politik nasional. Hal ini merupakan upaya untuk melaksanakan Perjanjian Helsinki tahun 2005 yang bertujuan untuk mengakhiri konflik militer di Aceh dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada Aceh dalam urusan politik dan pemerintahan.
2. Partai politik lokal sudah sangat mapan; Hal ini merupakan perkembangan baru dalam politik Aceh, karena partai-partai lokal lebih memahami isu-isu lokal. Masyarakat juga menaruh harapan besar terhadap berdirinya partai politik lokal tersebut, karena mereka percaya bahwa partai ini akan menjadi wadah bagi individu untuk mengutarakan cita-citanya dan meningkatkan optimisme masyarakat demi kemajuan wilayah Aceh. Namun, keberadaan Partai politik lokal di Aceh juga menjadi tantangan tersendiri dimana sebagian masyarakat berfikir bahwa partai politik lokal di Aceh lebih mementingkan kepentingannya sendiri di banding dengan kepentingan daerah dan masyarakat, hal itu menyebabkan masyarakat kini lebih cerdik dalam menilai kinerja partai politik lokal yang kini menjabat,

terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik lokal secara signifikan.

3. Perkembangan partai politik lokal yang ada di Aceh sudah sangat signifikan dan berkembang, hal ini terbukti dengan adanya tambahan-tambahan partai baru yang di Aceh pada saat pemilu 2024 yang lalu. Masyarakat pun sepertinya sudah tidak asing lagi dengan partai-partai lokal yang ada saat ini.

## 5.2 Saran

1. Keistimewaan yang di terima Aceh yaitu menjadi daerah dengan otonomi khusus sehingga di izinkan untuk mendirikan Partai Politik Lokal sendiri tidak hanya menjadi fenomena saja, tetapi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka dan dapat memajukan daerah Aceh.
2. Pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan partai politik lokal yang sudah tidak asing lagi, semoga juga sampai kepada masyarakat yang berada di pelosok Aceh yang mungkin tidak dapat mengakses internet atau minim listrik, tidak hanya pada bagian masyarakat kota atau yang bisa mengakses internet dengan mudah.
3. Perkembangan partai politik lokal yang sudah signifikan dan sangat berkembang harus tetap di pertahankan dan menjadi warna baru dalam perpolitikan Indonesia. Tidak menjadi fenomena sesaat saja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rashid Moten dan Sayed Sejarul Islam. 2005. *Introduction to Political Science*. Singapore: Thomson Learning
- Akmal, M., Muchsin, M. A., Jamil, T. M., Yusuf, R., & Saputra, J. (2019). The role of local political parties as political education in north aceh: a study of aceh party. *Opcion Año 35, Regular No, 24*, 731–745
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) hlm 7.
- ARMIA, M. S. (2017). Hubungan Ideal antara Partai Politik Nasional dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 7(1), 126–146. <https://doi.org/10.15642/jrp.2017.7.1.126-146>
- Boogers, M. (2010). *Local Political Parties in the Netherlands: Anomaly or Prototype? Local Government Studies*. 36 (1), 75-90
- Feith, H. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Hamid, A. F (2008). *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan
- Harris Aswansyah, “*Konflik Antar Partai Politik Lokal di Aceh ( Studi Penelitian Antara Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh pada Pemilu tahun 2014)*”, Vol.4 No.1, Jurnal FISIP Unsyiah, Febuari 2019, Hal.14.
- Hilman, B. (2012). *Ethnic politics and local political parties in Indonesia*. *Asian Ethnicity*, 13(4), 419-440. <https://doi.org/10.1080/14631369.2012.710078>
- Hilman, B. (2009). Aceh Party victory legitimate despite threat. *Published on The Jakarta Post* in <http://www.thejakartapost.com>



John A. McGarry, "Aceh's Quest for Peace: The Role of Local Political Parties", hal 1-18.

Juni Kriswanto, *590 Bacaleg Aceh Gugur Ikut Pemilu 2024 Karena Absen Tes Baca Al-quran*, (Banda Aceh: CNN Indonesia), Juni 2023.

Larry Diamond dan Richard Gunther, *Political Parties and Democracy*", hal. 54.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 4

Ma'asan Mayrudin, Y. (2017). DINAMIKA PARTAI POLITIK DAN POSITIONING IDEOLOGI: STUDI TENTANG PERGESERAN POSITIONING IDEOLOGI PARTAI-PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014. In *Journal of Governance* (Vol. 2, Issue 2).

Maghfirah, " Pengaruhi Komunikasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 Di Kota Makassar", ( Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar), 2019.

Maksum Syahri Lubis, 2008 "*Teori Politik*" ,(Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area , hal.24.

Muhammad Jafar AW, "Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", ( Semarang: Universitas Diponegoro), 2009.

Muhammad Nur Kholis *Partai Aceh: Dari GAM Menuju Partai Politik, Partai Aceh: Dari GAM Menuju Partai Politik*, (kompas.com).

M. Jafar, dkk, 2023, *Artikulasi Perpolitkan Aceh ( Pasca 18 tahun MoU Helsinki Aceh)*, Banda Aceh, hal. 97-100.

National vs Local Political Parties: The Dynamics of Representation and Policy Making, dalam *Journal of Politics*. Penelitian ini mengeksplorasi

bagaimana perbedaan struktur dan tujuan antara partai lokal dan nasional mempengaruhi pembuatan kebijakan.

Pamungkas dkk. (2019). Jejak Demokrasi Pemilu 1955. Indonesia: Arsip Nasional Republik Indonesia

Patock, R. (2010). From Rebels to Rulers and Legislator: The Political Transformation of the Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia. *Southeast Asian Studies*. 29 (1), 95-120

Reiser, Marion dan Everhard Holtmann (eds) (2008). *Farewell to the party Model? Independent Local List in East and West European Countries*. Wiesbaden: Alle Rechte vorbehalten.

Rinaldi S. dan Rahmat H, " *Local Politics and Political Parties in Aceh: The Impact of the Peace Process*,". Artikel ini menawarkan tinjauan tentang bagaimana proses damai dan otonomi khusus mempengaruhi politik lokal dan partai-partai di Aceh

Sudirman, " *Dinamika Politik Lokal dalam Social Capital (Modal Sosial)* ", Jurnal *Academica Fisip Untad*, Vol.04 No.01 Februari 2012, 741.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 222.

Syaikhu Usman, *Politik Lokal di Era Desentralisasi: Menuju Otonomi Rakyat*, (Salatiga:Lembaga Penelitian SMERU:2003), Hal.06

Syirwan Haniya, Maimun, " *Persepsi Tokoh Mahasiswa Terhadap Partai Aceh (Studi Kasus Tokoh Mahasiswa Usyiah)* ", Vol.1, No.1, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Usyiah*, Hal.1-2.

Tornquist, E. O., Stanley A. P & Teresa Birks. (2010). *Aceh The Role of Democracy for Peace and Reconstruction*. Yogyakarta: PCD Press Indonesia

Wawancara dengan Fatimah, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, (Angkatan 2018).

Wawancara dengan Cut Yumba Tarisya, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, (Angkatan 2019).

Wawancara dengan Putri Zelsi Arisandi, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, (Angkatan 2020).

Wawancara dengan Nabila Amira Septiana, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, (Angkatan 2021).

Wawancara dengan Ijlal (21 tahun), Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Wawancara dengan Marni Safitri, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.(angkatan 2021).

Wawancara dengan M. Qais Mubarak, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.(angkatan 2021).

Wawancara dengan Fadil Ihsan, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.(angkatan 2021).

Wawancara dengan Sariana, Mahasiswi Jurusan Ilmu administrasi negara Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh,(angkatan 2020).

Wawancara dengan Kurniawan Rizky, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh,(angkatan 2020).

Wawancara dengan Rinzani, Mahasiswi Jurusan Ilmu administrasi negara Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh,(angkatan 2020).

Wawancara dengan El Yordan, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh,(angkatan 2021).

Wawancara dengan Maulidar Fitri, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, (angkatan 2020).

Wawancara dengan Rizky Kusuma Chandra, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, (angkatan 2020).

Zico Furqon, *Eksistensi Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh,*( Jakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syariif Hidayatullah), 2013.



JUDUL SKRIPSI : PEMAHAMAN MAHASISWA ILMU POLITIK ATAS PARTAI LOKAL DI ACEH (Studi Kasus pada Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

RUMUSAN MASALAH :

1. Bagaimana perkembangan partai lokal di Aceh?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar-Raniry atas partai lokal di Aceh?

INSTRUMEN PENELITIAN PEMAHAMAN MAHASISWA ILMU PLITIK ATAS PARTAI LOKAL DI ACEH

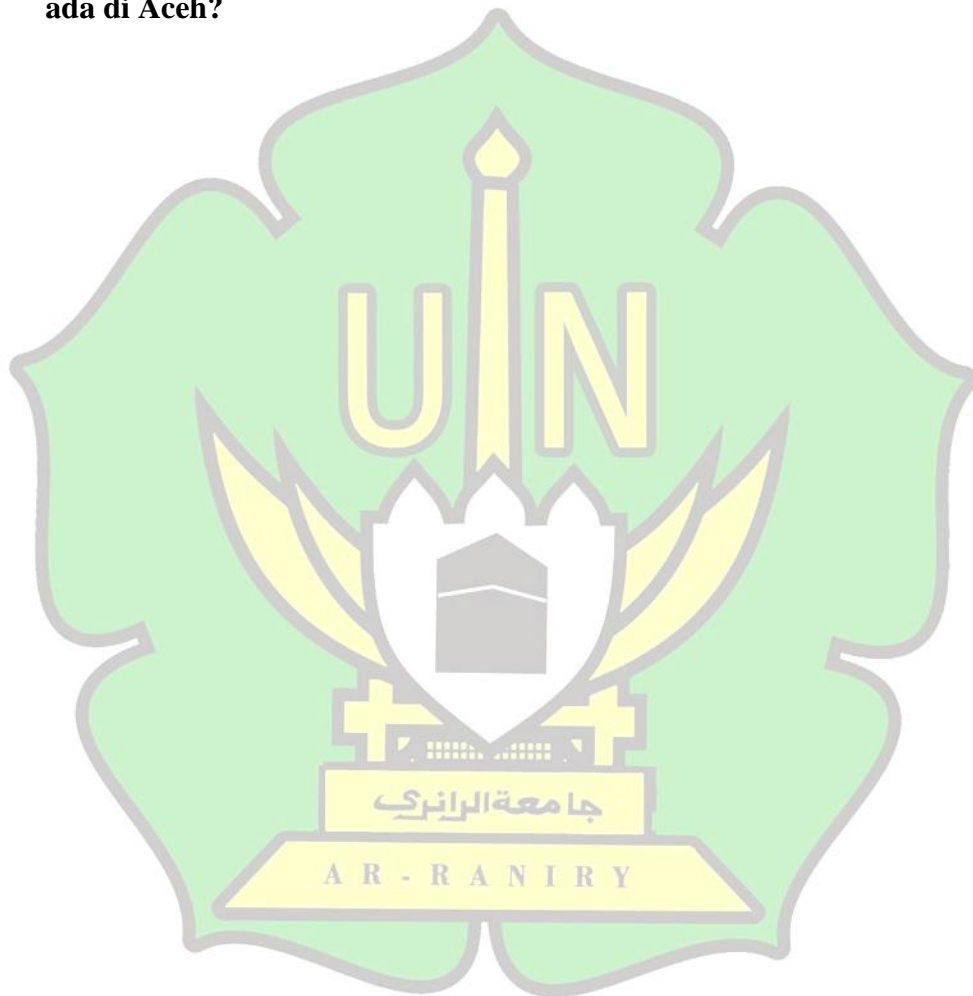
NO	RUMUSAN MASALAH	SUMBER DATA	PERTANYAAN
1	1. Bagaimana perkembangan partai lokal di Aceh?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nabila Amira Septiana</li> <li>2. Muhammad Ijlal</li> <li>3. Sariana</li> <li>4. Marni Safitri</li> <li>5. Fadil Ihsan</li> <li>6. M. Qais Mubarak</li> <li>7. Kurniawan Rizky</li> <li>8. Rinzani</li> <li>9. El Yordan</li> <li>10. Maulidar Fitri</li> <li>11. Rizky</li> </ol>	Menurut anda bagaimana perkembangan partai politik lokal yang ada di Aceh?

		Kusuma Chandra	
2	1. Bagaimana pemahaman mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar-Raniry atas partai lokal di Aceh?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nabila Amira Septiana</li> <li>2. Muhammad Ijlal</li> <li>3. Sariana</li> <li>4. Marni Safitri</li> <li>5. Fadil Ihsan</li> <li>6. M. Qais Mubarak</li> <li>7. Kurniawan Rizky</li> <li>8. Rinzani</li> <li>9. El Yordan</li> <li>10. Maulidar Fitri</li> <li>11. Rizky Kusuma Chandra</li> </ol>	Sebagai Mahasiswa Ilmu Politik, bagaimana pemahaman anda tentang Partai Lokal yang ada di Aceh ?



### **Lampiran 1. Pertanyaan Penelitian**

- 1. Sebagai Mahasiswa Ilmu Politik, bagaimana pemahaman anda tentang Partai Lokal yang ada di Aceh.**
- 2. Menurut anda bagaimana perkembangan partai politik lokal yang ada di Aceh?**



**Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara**

**FOTO WAWANCARA DENGAN MAHASISWA ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**









